

**PRAKTIK WACANA PERUMAHAN DIHARIAN UMUM KOMPAS
PADA MASA AWAL ORDE BARU**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh :

Etry Novica Kurniasari (14321114)

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2018**

SKRIPSI
PRAKTIK WACANA PERUMAHAN DIHARIAN UMUM KOMPAS
PADA MASA AWAL ORDE BARU

Disusun oleh
Etry Novica Kurniasari

143211114

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan
di hadapan tim penguji skripsi.



Tanggal :

Dosen Pembimbing Skripsi,


Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A

NIDN 153210506

SKRIPSI

**PRAKTIK WACANA PERUMAHAN DIHARIAN UMUM KOMPAS
PADA MASA AWAL ORDE BARU**



Disusun oleh

Etry Novica Kurniasari

NIM : 14321114

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal : **27 SEP 2018**

Dewan Penguji :

1. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A

NIDN 153210506

2. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A

NIDN 0516087901

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A

NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Etry Novica Kurniasari

NIM : 14321114

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 27 September 2018

Yang menyatakan,



Etry Novica Kurniasari

(14321114)

MOTTO

Education is the most powerful weapon

we can use to change the world

-Nelson Mandela-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besarku tercinta,

Terimakasih atas semua dukungan yang diberikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahillobbil'amin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Sholawat serta salam kepada junjungan nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa kesehatan lahir maupun batin, sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan sekarang ini.

Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai pelengkap pernyataan, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini sendiri mengkaji tentang **Praktik Wacana Perumahan Diharian Umum Kompas Pada Masa Awal Orde Baru** dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan beberapa studi literatur.

Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun non-materidari berbagai pihak, sehingga semua dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr.rer.nat. Arief Fahmie, S.Psi., M.A., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
3. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ratna Permata Sari, S.I. Kom. M. A selaku dosen pembimbing akademik
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan selama dibangku perkuliahan.

6. Keluarga tercinta khususnya orang tua, kakak-kakak dan keluarga besar abah dan ibu yang tiada henti mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir.
7. Teman-teman organisasi, baik teman-teman Lembaga Dakwah Mahasiswa UII juga teman-teman Paguyuban Seni rukun Rencang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir
8. Fulan salah satu mahasiswa pasca sarjana teknik Informatika yang selalu membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu komunikasi 2014 universitas Islam Indonesia

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti juga menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam pengembangan di masa datang dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 2018

Penulis

Etry Novica Kurniasari

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Landasan Teori.....	16
1. Komunikasi Geografi	16
2. Mediasi Ruang.....	18
3. Wacana	19
4. Media Masa sebagai Institusi Wacana	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Paradigma Penelitian	22
2. Pendekatan.....	22
3. Metode pengumpulan dan analisis data.....	22
BAB II.....	24
GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN	24

1. Sejarah Perumahan di Indonesia	24
2. Sejarah Media Kompas	26
3. Pemberitaan Rumah Pada Surat Kabar Kompas	30
BAB III	32
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Temuan	32
1. Struktur Wacana Perumahan di Masa Orde Baru	32
2. Praktik Wacana Perumahan di Kompas	60
B. Pembahasan.....	74
BAB IV	81
PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN	81
B. KETERBATASAN PENELITIAN.....	82
C. REKOMENDASI.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	36
Gambar 2	39
Gambar 3	41
Gambar 4	47
Gambar 5	48
Gambar 6	48
Gambar 7	49
Gambar 8	49
Gambar 9	51
Gambar 10	53
Gambar 11	56
Gambar 12	57
Gambar 13	68
Gambar 14	71
Gambar 15	75

Abstrak

14321126

Etry Novica Kurniasari. 14321114. Praktik Wacana Perumahan Diharian Umum Kompas Pada Masa Awal Orde Baru. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian mengenai peranan media dalam memberitakan sebuah lokasi berupa rumah atau perumahan. Objek yang diambil oleh penulis adalah media cetak harian kompas, penelitian ini meneliti tentang bagaimana bangunan rumah atau perumahan direpresentasikan dalam berita di kompas mulai tahun 1970 hingga tahun 1979. Rumah bukan lagi didefinisikan dari satu perspektif dan posisi, melainkan juga didefinisikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan didalamnya. Barang berupa rumah bukan lagi hanya sebagai barang kebutuhan keluarga, namun juga sebagai barang hasil produksi.

Penelitian ini juga membahas tentang wacana perumahan yang terjadi pada zaman orde baru dengan menggunakan analisis wacana Foucault. Penelitian ini menjelaskan bahwa wacana-wacana rumah atau perumahan pada zaman orde baru adalah pengulangan wacana-wacana rumah atau perumahan pada zaman-zaman pemeritahan sebelumnya walaupun dengan konsep yang berbeda.

Abstract

14321114

Etry Novica Kurniasari.14321114. Praktik Wacana Perumahan Diharian Umum Kompas Pada Masa Awal Orde Baru. Bachelor's Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia.

This research is a research on the role of the media in reporting a location in the form of a house or housing. The object taken by the author is Kompas daily print media, this study examines how the building of a house or housing is represented in the news in Kompas from 1970 to 1979. Houses are no longer defined from one perspective and position, but are also defined by people who have an interest in it. Goods in the form of houses are no longer just as family necessities, but also as products.

This study also discusses the housing discourse that occurred in the New Order era by using Foucault's discourse analysis. This study explains that the discourses of houses or housing in the New Order era were the repetition of the discourses of houses or housing in the days of the previous government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah adalah kebutuhan manusia. Pada masa lalu atau di dalam masyarakat tahap premodern, rumah dibangun oleh manusia sendiri. Rumah dibangun dengan kayu-kayu liar di hutan yang dikumpulkan secara pribadi. Dilain sisi, bentuk rumah juga membedakan kasta sosial personal. Rumah milik rakyat yang berkasta sudra biasanya berbentuk gubuk dan berada di tepi kali atau sugai. Sedangkan rumah milik penguasa memiliki halaman yang luas, memiliki banyak bilik, dan memiliki pendopo. Contoh rumah ini adalah rumah Tunggul Ametung dan ke Dedes. (Pramoedy Anantatoer: 2015)

Dengan perkembangan jaman, gerak populasi dan terutama laju kapitalisme, sebuah rumah tidak lagi didefinisikan oleh manusia sendiri. Rumah didefinisikan oleh banyak kekuatan lain, kumpulan pemodal, pemerintah kota dan atau Negara. Janji perumahan dengan DP 0 rupiah oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ketika masa kampanye Pilkada Jakarta adalah contoh bagaimana masyarakat dilihat sebagai subjek yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan. Janji Anis Baswedan dan Sandiaga Uno itu adalah contoh juga bagaimana rumah tidak lagi merupakan urusan pribadi seorang manusia, tetapi juga melibatkan kuasa yang lainnya.

Dimasa sekarang, ketika seseorang hendak membangun rumah maka pertanyaan yang diajukan biasanya adalah apakah ia hendak membangun rumah (dengan terlebih dahulu membeli tanah) atau membeli rumah di kompleks perumahan. Dalam kasus ini, kita menemukan dua konsep yang berbeda yang melekat begitu saja dalam benak masyarakat Indonesia; 'rumah' dan 'perumahan'. Lebih jauh, dalam bahasa keseharian masyarakat Indonesia masih dikenali istilah 'perumnas'(perumahan nasional), untuk menyebut

sebuah kompleks perumahan yang dibangun oleh Negara, yang berbeda dengan kawasan di mana warga yang membangun rumah sendiri. Dimasa sekarang bahkan banyak berkembang perumahan dengan label ‘perumahan muslim’ untuk membedakan dengan hunian yang lain. Artinya, istilah sederhana ‘perumahan’, sebagai wacana pada akhirnya turut difungsikan untuk klasifikasi sosial dalam masyarakat.

Menilik fakta di atas, perumahan merupakan wacana yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meski demikian tinjauan mengenai bagaimana perumahan diwacanakan di Indonesia sangatlah sedikit. Dalam studi komunikasi, pembahasan bagaimana perumahan dikomunikasikan/dimediasi sehingga ia dapat dikenali dan digunakan oleh masyarakat Indonesia di jaman sekarang hampir tidak ada. Hingga sekarang tidak ada satupun penelitian komunikasi yang mencoba mempertanyakan; sejak kapan masyarakat Indonesia mengenal wacana ‘perumahan’ dan bagaimana kemudian komunikasi/media berperan dalam mengkonstruksi gagasan masyarakat Indonesia mengenai perumahan. Untuk itu penelitian mengenai mediasi perumahan penting dilakukan dalam studi komunikasi di Indonesia.

Sebagai sebuah pembuka dalam studi mediasi perumahan, penelitian ini bermaksud memeriksa wacana perumahan dalam masa pemerintahan orde baru. Studi mengenai wacana perumahan oleh pemerintah Orde Baru mempunyai posisi penting dalam pewacanaan perumahan dan industri perumahan di Indonesia. Masa pemerintahan Suharto dikenal sebagai masa Pembangunan, bahkan Soeharto, pemimpin rezim orde baru diakui sebagai ‘Bapak Pembangunan Indonesia’. Pemerintahan Soeharto juga terkenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) selama lima periode. Mobilitas penduduk dan populasi mulai diatur oleh Negara dengan massifikasi program transmigrasi dan Keluarga Berencana. Dalam kaitannya dengan perumahan, terdapat beberapa alasan yang membuat studi mediasi perumahan di jaman orde baru menjadi penting.

Pertama, mulai di tahun 1970 pemerintah orde baru bekerja sama dengan PT. Djakarta Housing membangun 150 perumahan untuk umum. PT. Djakarta Housing adalah sebuah usaha *join-enterprise* antara Indonesia (PT 51) dan Jepang (Tosho Sangyo Co.Ltd). Untuk menjalankan program pembangunan rumah rakyat ini modal pertama yang dipakai adalah 70 persen dari pihak Jepang dan 30 persen dari pihak Indonesia (kompas, 22/1/1970 hal. 2)

Kedua, Selain melakukan *join-enterprise* dengan Jepang, pemerintah orde baru membentuk semacam komunitas yang beranggotakan perusahaan-perusahaan real estate yang ada di Indonesia pada masa itu. Komunitas tersebut diberi nama “*Real Estate Indonesia (REI)*” dengan harapan adanya kerja sama pemerintah dan komunitas perusahaan Real Estate tersebut dapat membangun rumah rakyat dengan harga murah. (kompas, 14/3/1970 hal. 3)

Ketiga, Tahun 1974 pemerintah orde baru membangun perusahaan negara yang kini kita kenal dengan PERUMNAS. Perumnas adalah salah satu bentuk gerakan pembangunan dari pemerintah orde baru. Perumnas dijalankan dengan tiga program dasar pemerintah. Yakni 1)program transmigrasi 2)penyediaan rumah rakyat 3)perbaikan kampung. Dalam hal ini perbaikan kampung meliputi hak otonomi daerah (kompas, 12/2/1975hal. 8).Ketiga alasan tersebut pada pokoknya mengarah pada kesimpulan bahwa hanya pada masa orde baru terjadi pembangunan perumahan secara massal, sehingga penelitian mediasi perumahan di masa ini menjadi penting.

Keempat, Orde Baru adalah orde dimana peran media menjadi penting karena media kerap kali menjadi representasi Negara, ia menjadi corong Negara. Yakni media sebagai alat propaganda kemerdekaan dan nasionalisme. Dilain sisi, media juga sebagai ukuran pergerakan beberapa organisasi dan kemajuan Negara dalam hal perjuangan (David T. Hill: 2011).

Penelitian ini sendiri masuk dalam ranah studi komunikasi geografi, yakni cabang komunikasi yang mempelajari hubungan media atau tindakan komunikasi dengan pembentukan ruang/tempat, atau dengan kata lain media memediasi lokasi atau tempat. Bidang kaji teori Komunikasi geografi meliputi

studi media, cultural studies, studi urban, studi pariwisata, dan studi budaya konsumen.

Peneliti memilih media cetak Kompas karena media cetak tersebut telah berdiri sejak 1965. Sehingga pada masa orde baru Kompas telah ikut serta untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas, dan pada masa itu surat kabar yang memberitakan tentang progress program perumahan rakyat hanya Kompas. Selain itu Koran harian Kompas memiliki data berupa data digital yang tersedia pada pusat informasi Kompas. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk pengambilan data.

B. Rumusan masalah

Di Indonesia, orang biasa mengucapkan istilah perumahan, seakan-akan itu adalah istilah yang datang dengan sendirinya atau istilah yang sejak mula ada. Meski tampak alamiah, munculnya istilah tersebut yang biasanya disandingkan dengan istilah 'rumah' sendiri, menandai bahwa istilah tersebut tidaklah netral, melainkan punya sejarahnya sendiri. Dalam konteks Indonesia, istilah ini dimassifikasi pada masa orde baru yang merupakan rezim pembangunan.

Pada masa orde baru pula, media massa menjadi instrumen penting untuk mengetahui bagaimana perumahan diidentifikasi oleh masyarakat Indonesia. Teks media pada masa orde baru mengenai perumahan adalah representasi identitas perumahan atau bagaimana perumahan didiskusikan, dinegosiasikan oleh masyarakat. Artinya, penelitian ini tidak akan menaruh perhatian pada ideology/kebijakan media, melainkan melihat teks media massa sebagai sebuah arsip rekaman bagaimana perumahan diwacanakan oleh sebuah kultur masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; **Bagaimana Formasi Wacana Perumahan pada Masa Orde Baru?**

Dari rumusan masalah tersebut penulis menggunakan formasi wacana, yakni melihat sebuah peristiwa dari berbagai posisi. Diantaranya adalah

formasi subjek, formasi objek, dan formasi konsep, maka dari itu penulis mengangkat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur wacana perumahan pada masa orde baru?
2. Bagaimana praktik wacana perumahan di Kompas?

C. Tujuan

Tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahuistruktur wacana perumahan pada masa orde baru
2. Mengetahuipraktik wacana perumahan di Kompas

D. Manfaat

1. Manfaat akademik

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan discourse pada teks media cetak. Karena penelitian wacana dalam bidang komunikasi geografi sangat jarang, bahkan di Indonesia belum ada yang melakukan penelitian terhadap bidang kaji tersebut.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca agar lebih memahami perihal wacana dalam pemberitaan media cetak, khususnya pada pemberitaan tentang perumahan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama, tentang sistem perumahan di Indonesia oleh Fashbir Noor Sidin (2002). Penelitian ini dilakukan oleh seorang dosen fakultas ekonomi Univ. Limau Padang dengan latar belakang pendidikan program urbanisasi di tiga universitas yang berbeda nasional dan internasional. Penelitian tersebut membahas tentang perkembangan perumahan dari masa

orde lama hingga ke orde baru. Pembangunan rumah pada waktu masa pemerintahan orde baru tersebut adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk membangun Negara. Tepatnya memajukan infrastruktur termasuk perumahan, pengadaan program urbanisasi, dan pembedaan karakter fisik lingkungan yang mencakup desa dan kota beserta pertumbuhannya. (Fashbir Noor Shidin: 2002)

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penentuan kebijakan perumahan pada masa pemerintahan Suharto tersebut untuk menunjang kebijakan urbanisasi. Pada saat itu Urbanisasi menjadi tonggak program kebijakan pada REPELITA. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah orde baru mengatur aturan pembangunan perumahan. Turn tersebut disepakati dengan penduduk yang menjadi peserta migrasi di kantor Menpora pada tanggal 1987. (Fashbir Noor Shidin: 2002)

Pada tahun 1990 pemerintah Indonesia melakukan sensus penduduk dengan hasil hanya 30 persen imigran yang tinggal di urban area. Urban area merupakan daerah yang jauh dari perkotaan. Sedangkan 60 persen hidup di kota besar dengan standar kehidupan tidak layak dan sisanya diluar daerah jawa banyak kota yang terbatas kehidupannya, karena bentuk geografi lingkungan lebih pada pedesaan dan hutan. (Fashbir Noor Shidin: 2002)

Penelitian ini lebih menekankan pada urban studies. Walaupun disini sistem perumahan juga disinggung, tetapi hanya sebatas pembentukan awal bagaimana rumah itu dirumuskan oleh pemerintah dari masa kolonial sampai pada masa pemerintahan Suharto. Dengan kata lain saat pemerintahan Suharto dimulailah rezim dimana pemerintah mengintervensi tentang pembangunan rumah sebagai wujud kemajuan Negara. (Fashbir Noor Shidin: 2002)

Penelitian kedua, penelitian ini dilakukan oleh Grimes dan Orville F (2012) yang membahas tentang kegunaan perumahan. Penelitian tersebut berjudul "*Housing for Low-Income Urban Families: Economics and Policy in the Developing World*". Perumahan sebenarnya sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Hal ini kontras dengan kondisi perumahan dan kebijakan resmi yang ada di banyak negara berkembang. Bagi

kelompok berpenghasilan menengah keatas, perumahan biasanya mahal dalam kaitannya dengan pendapatan dan kualitas tempat tinggal yang ada. Sementara pemukiman yang padat dan tidak sehat banyak ditinggali oleh keluarga yang berpenghasilan menengah kebawah. (Grimes dan Orville F: 2012)

Keluarga di tempat tinggal ilegal terus menghadapi ancaman penggusuran, kelangkaan air, pembuangan limbah, dan transportasi. Seringkali, di bawah bendera pembersihan pemukiman kumuh, kelompok berpenghasilan rendah dipindahkan ke tempat tinggal berkualitas lebih tinggi yang terletak jauh dari peluang menghasilkan pendapatan dan diminta untuk membayar uang sewa yang tidak mampu mereka bayar. (Grimes dan Orville F: 2012)

Hal ini tidak berusaha untuk menganalisa alokasi optimal investasi di daerah perkotaan atau untuk menyarankan tempat tinggal yang seharusnya dimiliki dalam investasi tersebut. Tidak ada argumen untuk pergeseran modal dan sumber daya lainnya dari sektor lain ke dalam perumahan. Sebaliknya, maksud utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja pasar perumahan perkotaan, terutama karena hal itu mempengaruhi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga dapat menghasilkan penggunaan sumber daya yang telah digunakan untuk perumahan dan memungkinkan sumber daya baru untuk digunakan secara efektif. (Grimes dan Orville F: 2012)

Penelitian ketiga diambil dari Freek Colobijn. Seorang Dosen VU University Amsterdam, Amsterdam ·di Departemen Antropologi Sosial dan Budaya. Freek adalah Antropologi Budaya, Antropologi Sejarah dan Sejarahwan dalam bidang Budaya. (Freek Colobijn: 2010)

Di tulisan jurnalnya mengatakan bahwa program urbanisasi sebenarnya adalah sebuah politik Negara pada saat dekolonialisasi Indonesia di tahun 1930-1960. Dimana politik tersebut dimanfaatkan untuk kebijakan housing atau pembangunan perumahan untuk pengaturan tata kota yang lebih rapi dan terjaga. Kebijakan urbanisasi tersebut sebagai dasar awal bagaimana pembangunan rumah itu dilakukan oleh pemerintahan kolonial dengan beberapa ketentuan kelayakan rumah siap huni. (Freek Colobijn: 2010)

Indonesia pada pemerintahan kolonial Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah utama. Yakni wilayah Jawa, wilayah Sumatra dan Indonesia wilayah timur. Kebijakan utama diambil dari Tokyo dan kekuatan besar kebijakan militer diambil di Singapura bagian selatan. Kemudian Bukit Tinggi, Jawadan Makassar menjadi episentrum dari ketiga pembagian wilayah tersebut. Pada Agustus 1942 sistem tersebut mulai diperkenalkan kepada masyarakat sebagai proyek utama pembangunan wilayah. (Freek Colobijn: 2010)

Pada saat kepemimpinan Jepang itulah mulai diatur kota dan desa (wacana pembangunan sebelum kolonial Belanda masuk). Hal ini dilakukan untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia pemerintahannya masih dibawah kepemimpinan Jepang. Disaat itu pula terbentuk sistem demokrasi baru yang dipelopori Jepang untuk Indonesia. Diantara kebijakan baru adalah pemangsaan pegawai Belanda dan digantikan dengan tujuh bels ribu pelayan pribumi. Namun pelayanan tersebut tidak semua untuk mengurus perkotaan melainkan hanya untuk mempersiapkan legalitas kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya program tata kota belum bisa berjalan karena kemunduran Jepang disusul dengan kedatangan Sekutu. Sehingga program penataan kota dan program pengaturan kewilayahan berhasil dieksekusi pada masa pemerintah kolonial Belanda. (Freek Colobijn: 2010)

Penelitian ke empat diambil dari Rudy Trisno yang berjudul Pada tulisannya "Perception of the Inhabitants and Feng Shui Concept for the Balinese Traditional Housing that Adapts Nawa Sanga Space Concept" pada tulisannya Rudy Trisno menyatakan bahwa dalam membangun rumah tidak serta membangun rumah begitu saja, melainkan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang diambil adalah mengadopsi konsep Nawa Sanga. (Rudi Trisno: 2012)

Konsep Nawa sanga adalah konsep yang dipakai oleh orang Bali, dimana konsep tersebut mirip dengan konsep Feng Shui yang terkenal di Indonesia dengan pemikiran bangsa Cina. Konsep tersebut memiliki tujuan kemakmuran dan kesehatan bagi orang-orang yang berada didalamnya. (Rudi Trisno: 2012)

Perbedaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah dari segi tujuan dibangunnya rumah. Rudi Trisno berpendapat bahwa rumah dibangun untuk kemakmuran penghuni, tetapi penelitian ini meneliti tentang bagaimana rumah dibangun sesuai wacana yang ada pada masa pemerintahan orde baru. (Rudi Trisno: 2012)

Penelitian kelima berasal dari Ambar Teguh Sulistiyani, yang menyatakan bahwa faktor dominan pendorong urbanisasi di Indonesia disebut juga sebagai faktor ekonomi. Bahkan di negara-negara berkembang pada umumnya alasan ekonomis ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mendorong munculnya urbanisasi subsisten. Selain itu, para masyarakat melakukan migrasi hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat bertahan hidup saja (survive), bukan untuk memperjuangkan keinginan yang lebih tinggi, tetapi lebih kepada memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Pada tulisannya, Sulistiyani menjelaskan bahwa Proporsi penduduk kota terus bertambah. Data yang diketengahkan oleh Salim (dalam Budihardjo, 1984:212) memperlihatkan, bahwa di tahun 1960-an penduduk kota hanya 15% dari seluruh penduduk Indonesia. Satu dekade kemudian penduduk kota sudah mencapai 20% dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik, penduduk kota terus saja mengalami pertumbuhan sampai mencapai lebih dari 30% di tahun 1990 dan diperkirakan akan mencapai 40% di tahun 2000 dari seluruh penduduk Indonesia. Dalam 3 dasawarsa yaitu dari tahun 1970 hingga 2000 penduduk kota terus mengalami peningkatan jumlah yaitu dari 20% menjadi 40%. Data tersebut menunjukkan gejala sangat serius terlebih-lebih bila dibandingkan dengan kapasitas kota dalam penyediaan tempat tinggal serta fasilitas yang memadai. Stilwell (1995) berpendapat, perkembangan penduduk kota, terutama di negara-negara sedang berkembang merupakan rnanifestasi yang nyata dari era revolusi perkotaan. Dampak lanjutannya adalah semakin menurunnya kualitas hunian di perkotaan. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Rendahnya kualitas atas suatu pemukiman merupakan hal serius sehingga harus mendapatkan perhatian. Di tambah lagi kualitas hunian yang sangat buruk dapat menimbulkan terancamnya jiwa manusia, karena bagaimanapun juga kualitas kesehatan seseorang juga ikut ditentukan oleh bagaimana kualitas tempat tinggalnya. Bahkan dampak buruk yang ditimbulkan ini tidak hanya terlokalisir pada komunitas yang menempati kawasan kumuh, namun juga akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Pertumbuhan penduduk di perkotaan idealnya harus diimbangi dengan daya tampung pemukiman. Jenis perumahan yang ditawarkan hendaknya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan perumahan dengan harga terjangkau masyarakat miskin selayaknya harus diutamakan, di samping penyediaan *real estate* yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu, dan mengingat pertimbangan banyaknya jumlah kaum urban yang dilatarbelakangi oleh kemampuan ekonomi yang sangat rendah. Kebutuhan perumahan sebagai akibat urbanisasi yang tak terkendali lebih banyak menimbulkan peningkatan permintaan potensial akan perumahan tetapi bukan permintaan efektif. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Sifat atas permintaan potensial adalah bahwa secara riil orang membutuhkan rumah sebagai tempat bernaung, tetapi mereka tidak mempunyai daya beli yang memadai. Sedangkan permintaan efektif adalah kebutuhan akan rumah yang disertai dengan daya beli yang seimbang. Kedua jenis permintaan ini masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri. Apabila sekelompok orang memerlukan sarana tempat tinggal, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau, maka ini menjadi picu munculnya *slum area*. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Pada tulisannya Sulistiyani juga menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan perumahan di perkotaan dicanangkan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pada sektor lain, seperti kebijakan pengendalian urbanisasi, kependudukan, dan pembangunan pedesaan dan diversifikasi ekonomi dan pembuatan *site planning* untuk dapat memperjelas pengembangan

kota sehingga lebih terkendali. Keterbatasan lahan untuk kawasan pemukiman di kota akan dapat diatasi dengan kebijakan penyediaan perumahan di perkotaan yang lebih berorientasi pada pembangunan perumahan vertical. Mengingat dengan demikian alternatif yang dapat ditawarkan adalah *flat, mall system dan communal house*. Tulisan ini lebih melihat pada kebijakan perumahan dari akibat kebijakan urbanisasi yang dirancang oleh pemerintah. (Ambar Teguh Sulistiyani: 2002)

Penelitian keenam datang dari Fahirah. F, mahasiswa dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako. Judul penelitiannya adalah *Variabel-Variabel Penilaian Properti Pada Perumahan di Palu Barat*. Penelitiannya membahas tentang unsur-unsur yang ditekankan untuk memilih rumah siap huni. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman terus bertambah, hal ini disebabkan karena adanya fenomena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan berbanding dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. (Fahirah: 2011)

Perumahan berupa lahan (tanah) dan bangunan merupakan aset yang paling mendominasi penilaian suatu properti. Dalam menilai suatu properti ada beberapa faktor atau variabel yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penilaian properti perumahan. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke penghuni perumahan secara random sampling kemudian diolah secara deskriptif dan menggunakan skala sikap yaitu skala likert, untuk mengetahui prosentase persepsi penghuni perumahan terhadap variabel penilaian properti. (Fahirah: 2011)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur yang paling berpengaruh terhadap penilaian properti (lahan dan bangunan) perumahan di Palu Barat berdasarkan persepsi penghuni perumahan (konsumen) adalah unsur aksesibilitas, faktor sosial dan ketersediaan fasilitas. Unsur aksesibilitas adalah bagaimana akses rumah tersebut dengan bangunan lain seperti tempat kerja atau warung. Unsur sosial lebih pada bagaimana konstruksi sosial dibentuk, seperti

perumahan A tempat hunian orang-orang borjuis. Kemudian unsur ketersediaan fasilitas yang menunjang hunian tersebut untuk layak dijadikan tempat tinggal. (Fahirah: 2011)

Penelitian ketujuh datang dari Zakiah Hidayati dengan judul penelitian *Hubungan Layout Perumahan Dan Faktor Kriminalitas di Perumnas Air Putih Samarinda*. Zakiah Hidayati adalah mahasiswi Program Studi Arsitektur Politeknik Negeri Samarinda. Berdasarkan layout-nya, Perumnas Air Putih memiliki akses keluar masuk perumahan dan zona 1-4 yang cukup banyak dan memiliki bentuk akses yang berbeda-beda. Pola sirkulasi dan pola hunian cukup beragam, terdapat sirkulasi yang banyak atau sedikit terhubung dengan sirkulasi lain dan ada pola hunian dengan bentuk linier yang pendek dan panjang. Fasilitas pun berbeda-beda jenis dan sifatnya antara satu dengan lainnya. (Zakiah hidayati : 2012)

Penelitian ini bertitik tolak dari teori dan konsep yang dihasilkan dari teori Housing Layout Untermann dan Small (1983). Parameter yang diturunkan dari konsep Housing Layout kemudian dihubungkan dengan kondisi layout Perumnas dan dianalisis dengan data empiris (data kriminalitas meliputi waktu, bentuk, lokasi, frekuensi dan obyek pencurian). Indikator penelitian dilakukan dengan merujuk kepada teori Defensible Space. Teknik analisis menggunakan teknik wawancara, observasi, j-graphs dan axial line. Teknik j-graphs dan axial line dikembangkan oleh Bill Hillier dan Hansons dalam *Social Logic of Space* (1984). Dua teknik terakhir dapat diterapkan pada denah bangunan, siteplan kawasan dan kota. (Zakiah hidayati : 2012)

Hubungan yang dihasilkan dari layout perumahan dan kriminalitas adalah hubungan yang sangat erat, sedikit dan tidak ada hubungan sama sekali. Faktor yang paling berhubungan antara layout perumahan dan kriminalitas adalah koneksi langsung antara rumah dengan akses perumahan (koneksi langsung meningkatkan kriminalitas), kedalaman ruang (semakin dalam posisi rumah maka akan semakin aman), indeks konektivitas aksial (semakin tinggi nilai indeks maka semakin rawan kriminalitas) dan mixed use(semakin banyak

rumah di dekat area fasilitas akan menciptakan area yang lebih aman dibandingkan dengan sedikit rumah di dekat area fasilitas).(Zakiah hidayati : 2012)

Penelitian kedelapan datang dari I Ketut Alit. Yakni dosen program studi arsitektur, fakultas teknik Universitas Udayana. Penelitian ini membahas tentang Undagi. Undagi adalah arsitek yang ahli dalam rancang bangun termasuk pembangunan perumahan dan lingkungannya. Pola pendidikannya berangkat dari pendidikan non formal yang secara tradisional dilimpahkankururankan dari generasi ke generasi. Pengetahuannya melingkupi pemahanan materiil dan spiritual yang didapat melalui proses belajar, bekerja, dan berdoa untuk membuahkkan karya sebagai dharma. Semuanya dimaksudkan untuk penyelarasan dalam berbhuana untuk mencapai kesejahteraan lahir batin. (I Ketut Alit: 2003)

Kinerja undagi secara metodis selalu mengikuti proses sesuai kaidah-kaidah adat, sosial, budaya, keagamaan, serta berbagai tulisan yang terhampar dalam berbagai rontal. Hasil karyanya merupakan suatu yang khas dan unik yang kini menghadapi krisis tersembunyi dari berbagai permasalahan, diantaranya bagaimana seorang undagi harus bersikap dalam menghadapi perkembangan arsitektur khususnya pembangunan perumahan yang makin kompleks dalam era globalisasi.(I Ketut Alit: 2003)

kinerja undagi adalah: 1)memiliki fungsi dan peran dalam rancang bangun rumah, perumahan, dan lingkungannya; 2)mengungkapkan filosofi dan konsep serta pemalihannya dalam rancang bangun, kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, dan budayanya; 3)ikut berperan sebagai katalis perantara diantara pelaku pembangunan untuk mencapai kinerja pembangunan yang lebih tinggi serta bertolak dari pendekatan yang bertumpu pada komunitas; 4) sebagai pendamping dan penggerak masyarakat dalam pembangunan informal sesuai latar belakang pendidikannya.(I Ketut Alit: 2003)

Kini, peran undagi dihadapkan pada pendidikan formal yang memiliki silabus dengan arah dan tujuan pendidikan yang jelas dalam pelaksanaan proses

belajar dan mengajar. Kendati begitu, undagi adalah arsitek dan arsitek belum tentu undagi, sehingga mereka masih tetap berperan walaupun lingkup kinerjanya kian terbatas dan terabaikan karena kurang kuasanya menghadapi kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terus berkembang. (I Ketut Alit: 2003)

Penelitian ke sembilan datang dari I Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gede Yana, dosen jurusan teknik arsitektur fakultas teknik, Universitas Udayana. Penelitian Ini Berjudul *Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan penduduk miskin adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan. (Putra dan Yana: 2007)

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia. Diperkirakan sekitar 4,5 juta unit besarnya backlog ketersediaan rumah yang layak huni disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk merupakan permasalahan perumahan yang dihadapi oleh Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin untuk pelaksanaan strategi nasional penanggulangan kemiskinan khususnya di dalam bidang perumahan. Penelitian ini menggunakan metode study literatur dari berbagai sumber. (Putra dan Yana: 2007)

Perencanaan yang matang dan dengan melibatkan masyarakat calon penghuni merupakan salah satu strategi untuk menyediakan rumah yang layak huni dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penghuninya. Rekayasa terhadap bahan bangunan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di negara berkembang dalam upaya mendapatkan rumah murah yang layak huni, baik dengan sistem standarisasi konstruksi maupun sistem koordinasi modular. (Putra dan Yana: 2007)

Sistem standarisasi dan sistem koordinasi modular adalah merupakan rekayasa bahan bangunan yang dapat dilakukan dalam upaya menyediakan rumah murah yang layak huni bagi masyarakat miskin dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat sesuai dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan. (Putra dan Yana: 2007)

Penelitian ke sepuluh datang dari Soedjajadi Keman, penelitian tersebut berjudul *Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perumahan sangat terkait dengan lokal dan nasional perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi serta kebiasaan, ekonomi, pendidikan, dan kondisi tradisi. Kesehatan Dunia Organisasi Komite Ahli (WHO) pada Aspek Kesehatan Masyarakat Perumahan pada pertemuan di Jenewa pada tahun 1961 menyatakan bahwa perumahan adalah lebih dari struktur fisik dan direkomendasikan untuk menggantikan perumahan untuk lingkungan perumahan jangka, yang berarti fisik struktur yang digunakan manusia sebagai tempat berlindung dan lingkungan dari struktur itu termasuk semua layanan, fasilitas, peralatan, dan perangkat yang diperlukan dibutuhkan dan keinginan untuk kesehatan fisik dan mental dan sosial yang baik menjadi keluarga dan individu. (Soedjajadi Keman: 2005)

Lingkungan perumahan adalah elemen inti dari komunitas perencanaan. Misalnya, perumahan baru dan yang sudah ada di daerah yang dibangun adalah biasanya terhubung dengan saluran pembuangan masyarakat luas dan regional dan sistem pasokan air, dan dilayani oleh koleksi sampah luas daerah dan organisasi pembuangan. Lingkungan yang merupakan lingkungan perumahan tergantung pada segmen yang lebih besar dari total komunitas untuk sekolah, transportasi, komunikasi, pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kesehatan lingkungan administrator dan insinyur kesehatan masyarakat memiliki tanggung jawab utama berfungsi sebagai anggota efektif, atau peserta aktif dalam pembahasan dan program yang relevan dari nasional dan nasional yang bersangkutan agensi. Semua mengakui perbaikan perumahan menjadi tujuan utama peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial dan

diperlukan untuk kondisi kesehatan dan lingkungan yang membaik. (Soedjajadi Keman: 2005)

Kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman juga karena penilaiannya secara jelas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Republik Indonesia No. 829 / Menkes / SK / VII / 1999. Orang-orang setuju itu perumahan merupakan prasyarat bagi kesehatan mental meskipun sulit untuk melakukannya buktikan hubungan itu. Penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa orang tinggal di daerah kumuh telah meningkatkan insiden penyakit menular dan kecelakaan rumah dibandingkan dengan orang yang tinggal di perumahan dan sanitasi lingkungan perumahan yang bersih.(Soedjajadi Keman: 2005)

F. Landasan Teori

1. Komunikasi Geografi

Komunikasi geografi adalah sebuah ranah studi yang muncul dari ambiguitas makna ruang dan makna konteks. Hadirnya komunikasi geografi menjadikan media sebagai penghapus batas-batas ruang atau wilayah, sehingga konteks yang biasanya memakai batas dan ruang menjadi ambigu. Sebagai contoh kita dapat melihat iklan pariwisata daerah Bali sebagai konsumsi publik. (Paul C Adams: 2012)

Komunikasi geografi berfokus pada bagaimana komunikasi memproduksi ruang dan bagaimana ruang memproduksi komunikasi. Oleh karena itu para sarjana komunikasi geografi mengakui bahwa adanya hubungan antara komunikasi dan geografi. Hubungan tersebut terjadi karena bidang Komunikasi dan bidang Geografi merupakan disiplin ilmu dengan subjek dan metodologi yang sama (Adam dan jasson: 2012). Komunikasi dan geografi tidak hanya dua disiplin ilmu yang beriringan, tapi juga mempunyai objek atau perhatian yang sama yaitu relasi komunikasi. Disisi lain, bidang komunikasi mempunyai sifat multidisiplin ilmu. Dalam hal

tersebut hubungan Komunikasi dan Geografi sudah lebih dulu berkaitan dibandingkan bidang ilmu komunikasi itu sendiri.(Adam dan jasson: 2012).

Pada komunikasi geografi, terdapat tiga aspek dasar pemikiran. Pertama, aspek ideologis/ politik. Hal ini menjelaskan bahwa bidang komunikasi geografi adalah studi yang menggabungkan citra dan pembentukan realitas ruang dengan kesadaran ideologis dan kesadaran kuasa. Kedua, aspek teknologi. Hal ini memberatkan pada bagaimana teknologi media berpengaruh dan dipengaruhi oleh hubungan sosial dari proses terjadinya komunikasi, akan tetapi menolak kemutlakan teknologi. Ketiga, aspek tekstural. Hal ini menjelaskan bahwa tumpuan bidang komunikasi geografi adalah pada bagaimana ruang komunikatif, material, dan simbol yang memungkinkan adanya pembentukan atau perubahan struktur.(Adam dan jasson: 2012).

Dalam bidang Geografi, ruang (space) dibedakan definisinya dari tempat (place). Ruang diartikan sebagai yang memberi posisi dan orientasi individu terhadap sebuah tempat (place), bisa dikatakan ruang adalah arahan bagaimana letak sesuatu dapat dimengerti keberadaannya. Kemudian tempat adalah unsur yang memberi karakter pada ruang, yakni bentuk real dari sebuah tempat itu sendiri yang diarahkan oleh ruang. Dalam hal ini ruang lebih abstrak, sedangkan tempat adalah sesuatu yang lebih material. Atau bisa juga disebut dengan materialisasi dari ruang. (Adam: 2010).

Fokus dari komunikasi geografis terletak pada empat bidang kaji, yaitu pertama adalah bagaimana tempat direpresentasikan dalam sebuah media (place in media). Kedua adalah bagaimana media diartikan dalam suatu tempat serta penyebabnya dalam konteks tertentu (media in place). Ketiga yakni bagaimana media dilihat dalam ruang-ruang tertentu (media in space). Kemudian yang keempat, bagaimana ruang-ruang direpresentasikan pada media (space in media). (Adam: 2010).

2. Mediasi Ruang

Berbicara tentang mediasi ruang tentunya tidak akan luput dari kajian media. Mediasi atau komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana suatu ruang dengan proses mediasi ruang, dimana ruang direpresentasikan dan mediatisasi perasaan keruangan, dimana pengalaman/perilaku keruangan seseorang dipengaruhi oleh narasi dan isi media. Dalam studi komunikasi, gagasan atas mediasi dan mediatisasi ruang merupakan sebuah asumsi awal dari lapangan studi komunikasi geografi. Komunikasi Geografi lahir dari makna ganda suatu ruang yang dihasilkan oleh media, dengan adanya media batasan-batasan ruang menjadi ambigu. (Dhonna, <http://www.remotivi.or.id/kupas/374/Memikirkan-UlangMedia-dalam-Komunikasi-Geografi>, diakses tanggal 15 juni 2018).

Pada tulisan sebelumnya, sudah dijelaskan tentang perbedaan ruang dan tempat serta bidang kaji Komunikasi Geografi. Kemudian pada tahun 2012, empat bidang ini dikembangkan dengan konsep lain yang lebih meluas dengan bidang komunikasi. Keempat bidang komunikasi tersebut menjadi: 1)representasi, 2)tekstur, 3)struktur, dan 4)koneksi. (Adam dan jasson: 2012).

Pada bidang representasi, komunikasi geografi berbicara tentang bagaimana tempat-tempat direpresentasikan dalam proses komunikasi (places in communication), kemudian Jasson mengembangkannya menjadi representasi-representasi ruang atau proses mediasi ruang. Bidang kaji perluasan dari Jasson tersebut terkait dengan aktivitas komunikasi. (Adam dan jasson: 2012).

Pada penelitian ini kajian yang digunakan adalah bidang representasi pengembangan dari Jasson, dimana rumah yang merupakan sebuah tempat dalam dunia nyata dimediasi oleh media lewat pemberitaan di media. Dalam hal ini media yang diteliti adalah koran harian kompas dari tahun 1970 hingga 1979. Penelitian ini menunjukkan bahwa rumah direpresentasikan sebagai program kebijakan pemerintah untuk rakyat.

3. Wacana

Wacana menurut Foucault adalah sistem pengetahuan yang memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi memerintah yang merupakan bentuk kekuasaan dalam bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern (hariyatmoko: 2017)

Konsep Foucault bertumpu pada hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Foucault mendefinisikan agak berbeda tentang kuasa, menurutnya kekuasaan tidak dimasukkan dalam term 'kepemilikan' melainkan sebuah praktik. Jadi kuasa bukanlah hal yang dimiliki, melainkan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Ketika ada banyak teoritis lebih memusatkan perhatian pada negara, maka Foucault berpendapat bahwa kekuasaan lebih kepada individu dan subjek yang kecil. (Eriyanto: 2009)

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya, dan pengetahuan berada didalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Untuk mengetahui kekuasaan, dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. (Eriyanto: 2009)

Kebenaran dalam hal ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak. Akan tetapi, kebenaran diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan

rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. (Eriyanto: 2009)

Kuasa tidak disalurkan lewat melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa mereproduksi realitas, mereproduksi lingkup-lingkup objek-objek, dan ritus-ritus kebenaran. Kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan regulasi menghukum, dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikendalikan dengan kekuasaan yang fisik, tetapi diawasi, diatur, dan didisiplinkan lewat wacana. (Eriyanto: 2009)

Sementara wacana menurut Fairclough adalah sebuah praktik kekuasaan dilihat dari bahasa. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial budaya, sehingga tradisi analisis tekstual dikombinasikan dengan konteks masyarakat yang lebih luas. (Eriyanto: 2009)

Menurut Fairclough, untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Bahasa dalam konteks ini membawa konsekuensi tertentu. Secara sosial, bahasa adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Maka dari itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

Dalam penelitian ini, analisis wacana yang dipake adalah analisis wacana Foucault, dimana masyarakat pada masa pemerintahan Soeharto sudah memiliki pengetahuan untuk membangun rumah. Namun, dengan adanya rezim orde baru publik diatur dengan regulasi pembangunan Negara. Pembangunan Negara yang dilakukan pada masa itu dari segala sektor, salah satunya pemerintah mampu menyediakan papan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat dikendalikan dengan aturan dengan wacana perumahan rakyat yang digerakkan pada masa Soeharto.

Wacana pembangunan negara dari bidang papan tersebut didukung wacana sebelumnya pada pemerintahan Soekarno, yakni wacana rumah

regional housing centre. Sementara wacana rumah regional housing centre didukung oleh wacana sebelumnya, yakni wacana rumah sehat pada zaman kolonial Belanda.

4. Media Masa sebagai Institusi Wacana

Media masa adalah salah satu media yang dapat memediasi informasi apapun terhadap audiens, sehingga audiens dapat merepresentasi informasi yang ada. Media masa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harian umum Kompas, dimana rubrik Kompas memediasi tempat atau rumah melalui berita yang dimuat didalamnya dalam kurun waktu tahun 1970-1979.

Sebenarnya wacana tentang rumah atau perumahan rakyat sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, hingga kemudian wacana tersebut berkembang pada zaman Orde Lama, dan terus berkembang pada zaman Orde Baru. Dengan demikian berita tentang rumah atau perumahan pada rubrik Kompas merupakan praktik wacana yang sudah berjalan lama, dan saat ini wacana tersebut dapat digolongkan menjadi sejarah.

Wacana-wacana tersebut adalah wacana-wacana yang muncul sebelum berdirinya Perumnas. Wacana-wacana tersebut diawali dengan wacana rumah sehat oleh bangsa Belanda yang ada di Indonesia dengan dalihan memajukan perkampungan Indonesia. Dari kebijakan tersebut, pemahaman tentang konsep rumah yang layak huni berkembang dari pemerintahan orde lama hingga ke orde baru melalui media.

Kompas mewacanakan rumah sebagai Rumah Rakyat, Rumah Sehat, dan Rumah Perumnas, dimana wacana-wacana tersebut merupakan pengulangan wacana yang telah ada sebelum masa Orde Baru.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kritis. Paradigma kritis mempunyai pandangan yang berbeda terhadap berita. Titik tekannya adalah pada kritik sosial. Paradigma ini berbicara bahwa selalu ada struktur sosial yang tidak adil. Ada kelompok yang mendominasi dan didominasi (Yasir: 2012).

Penelitian ini menganut paradigma kritis karena adanya satu pihak yang mendominasi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mendominasi dalam penyediaan rumah untuk rakyat.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Prof. Dr. Sugiyono: 2008).

Karena penelitian ini menekankan pada proses penelitian bukan hasil dari penelitian, bersifat induktif dan mengutamakan pengungkapan makna.

3. Metode pengumpulan dan analisis data

a. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui print out data dari Pusat Informasi Kompas (PIK) dimana pada PIK adalah drive media pemberitaan Kompas dari awal berdiri hingga sekarang. Data yang diambil dari PIK adalah berita perumahan dari tahun 1970 sampai 1979.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber sumber lain. Seperti skripsi, jurnal, buku, artikel dan web yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis mengumpulkan data-data penunjang terlebih dahulu. Yakni surat kabar lama baik berupa koran maupun majalah tentang rumah dan bangunan.

Metode analisis yang dipake analisis wacana Foucault. Yakni menganalisis berita dari koran dan majalah lama tentang rumah dan bangunan dan dikaitkan dengan sejarah sosial dan politik pada masa koonial, masa orde lama dan masa orde baru. Tepatnya adalah menganalisis posisi rumah pada masaorde baru.

BAB II

GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Perumahan di Indonesia

Perumahan di Indonesia berawal dari masa kolonial di tahun 1924 dimana pemerintahan kolonial mulai memfasilitasi rumah para pegawai pemerintahan Belanda. Kemudian didukung dengan kebijakan adanya KIP pertama kali di Surabaya (Kampung Vetebering) yang ditujukan untuk kepentingan Belanda yaitu *empowerement* (pemberdayaan). Hingga pada tahun 1926 dilakukan pembangunan perumahan rakyat yang berbentuk loji (rumah besar milik pejabat Belanda). (PU-NET, <http://perumahan.pu.go.id>)

Ditahun 1932 pemerintah kolonial melakukan renewal program berupa perbaikan kampung. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penularan penyakit agar tidak menular ke perumahan Belanda. Penyakit umum saat itu adalah penyakit pes. Program perbaikan kampung diwujudkan dengan perbaikan saluran air dan penyuluhan rumah sehat di kampung-kampung.(PU-NET, <http://perumahan.pu.go.id>)

Setelah melakukan penyuluhan rumah sehat, pemerintah kolonial melakukan kongres perumahan rakyat sehat di Bandung pada tahun 1950. Kongres tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dengan dasar perumahan sehat. Pada kongres ini pula dirumuskan standar rumah minimum dan segera dilakukan pembentukan badan perumahan rakyat beserta APBN.(PU-NET, <http://perumahan.pu.go.id>)

Tahun 1952 Badan Perumahan Rakyat mentargetkan 12.000 rumah dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP) menangani pembangunan perumahan. Sehingga telah terbangun perumahan di beberapa kota. Seperti perumahan dekat Universitas Merdeka di kota Malang dan di Surabaya pada Perum YKP Tenggilis dan Jemur Handayani dengan status tanah masih milik pemerintah kota.(PU-NET, <http://perumahan.pu.go.id>)

Perubahan benar-benar terjadi pada tahun 1953. Perumahan bekas Belanda diamankan oleh militer. Hal ini menyebabkan orang malas membangun rumah sehingga malas berurusan dengan kantor urusan perumahan. Satu tahun kemudian dilakukan pemusatan regional housing centre dengan tujuan dapat mengatur masalah perumahan dengan kondusif. Ditetapkan pula pajak bumi dan bangunan (PBB). Dilain sisi, ditahun yang sama dibentuk pula lembaga penelitian tentang rumah (LPMB) di Bandung. Tepatnya tanggal 1 maret 1955. Lembaga tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai united Nation Regional Housing Centre (UNRHC) dimana struktur dan sanitasi pembangunan rumah telah diatur didalamnya.(PU-NET, <http://perumahan.pu.go.id>)

Regulasi terus berjalan hingga pada tahun 1960 dikeluarkan ketetapan MPRS no. 2 tahun 1960 yang memuat tentang: 1) dalam bidang perumahan hendaknya membangun rumah sehat, murah, nikmat dan memenuhi syarat-syarat kesusilaan. 2) penyelenggaraan perumahan diselenggarakan. 3) pembangunan fasilitas perumahan oleh pemerintah dan, 4) dibangun di kawasan industri.

Sedangkan di tahun 1962 peraturan semakin disempurnakan. Aturan tersebut diwujudkan dengan undang-undang pokok perumahan no. 2 tahun 1962 tentang kebijakan perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dua tahun setelahnya, digagas UU no. 1 tahun 1964 (Perpu tahun 1962) dimana kantor urusan perumahan (KUP) mengurus rumah-rumah sebelum Indonesia merdeka. Ketetapan tersebut memuat tentang bentuk perumahan mengikuti YKP.

Ditahun 1964 dilaksanakan KIP di Jakarta. Memasuki era orde baru, pembangunan dirancang jangka panjang. Dimulai pada tahun 1972, pemerintah melakukan lokakarya nasional perumahan yang menghasilkan beberapa lembaga baru. Yakni: 1) badan koordinasi perumahan nasional (BKPN), 2) national urban development, 3) lembaga keuangan perkreditan, 4) building information centre (BIC) yang kemudian dialihkan menjadi “Pusat Informasi

Teknis Bangunan (PITB), 4)city urban development corporation, yang mengurus pembangunan kota. Hingga pada tanggal 6 Mei 1972 mulai muncul perusahaan real estate Indonesia dan KPR mulai berjalan.

Pada tahun 1974 perusahaan “Real Estate Indonesia” dibentuk bersamaan dengan “Perusahaan Umum Nasional (PERUMNAS)”. Hingga pada tahun 1976 mulai muncul kawasan perumahan baru di kota-kota besar. Seperti di Jakarta dan Medan. Dengan pembentukan *Perumnas* tersebut pemerintah dapat mewujudkan KIP menjadi program nasional ditahun 1979. Kemudian ditahun 1984 muncul konsep rumah “*Core*” dengan ukuran luas inti $16 m^2$ dan luas kamar $5 m^2$.

Pembaharuan kesejahteraan terus berlangsung, hingga disepanjang tahun 1984 sampai tahun 1994 (periode pelita ke-5) banyak bermunculan perusahaan Real Estate Indonesia (REI). Antara lain PT. Papan Sejahtera yang merupakan anak usaha dari Bank papan, dan beberapa bank swasta yang diijinkan oleh pemerintah untuk menjalankan program KPR Nasional.

2. Sejarah Media Kompas

Surat kabar harian Kompas adalah salah satu media pemberitaan yang ada di Indonesia, dan berkantor pusat di Jakarta. Surat kabar Kompas telah lama diterbitkan oleh PT. Kompas Gramedia Group (KG Group) pada tahun 1965. Sejak awal berdirinya, Kompas adalah bentukan atas ide dari Jendral. A. Yani yang kemudian menyampaikan gagasannya tersebut kepada Frans Xeverius Seda yaitu seorang Menteri perkebunan dalam kabinet Soeharto, untuk menerbitkan surat kabar yang kredibel, berimbang, dan independen. Kemudian Frans mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya. (Sularto dan Santoso: 2016)

Kedua teman baiknya tersebut adalah Peter Kansius ojong dan Jacob Oetama. Peter merupakan pimpinan redaksi mingguan “Star Weekly”. Jacob Oetama adalah seorang wartawan mingguan “Penabur” milik gereja Katolik yang pada saat itu sudah mengolah majalah “Intisari” ketika PT. Kint akan

mengalami kebangkrutan yang terbit tahun 1963. Peter menyetujui ide tersebut dan menjadikan Jacob Oetama sebagai editor in-chief yang pertama. (Sularto dan Santoso: 2016)

Satu tahun setelahnya, tepatnya tahun 1964 Presiden Soekarno mendesak partai Katolik untuk mendirikan media cetak berbentuk surat kabar, dan wartawan katolik tersebut direkrut dari wartawan bulanan “Intisari”. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik mengadakan pertemuan bersama dengan beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja (MAWI), diantaranya adalah Partai Katolik, Perhimpunan Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Perhimpunan Wanita Katolik yang menghasilkan keputusan untuk mendirikan Yayasan Bentara Rakyat. (Sularto dan Santoso: 2016)

Ignatius Joseph Kasimo adalah pengurus pertama dari Yayasan Bantara Rakyat dan ia juga merupakan ketua partai katolik yang ditunjuk sebagai ketua umum. Frans Seda sebagai wakil ketua. Franciscus Conradus Palaoensoeka berkontribusi sebagai penulis pertama, Jacob Oetama sebagai penulis kedua, dan Peter Kansius Ojong sebagai bendahara dari yayasan tersebut sehingga rubrik harian yang direncanakan dapat diterbitkan. Untuk edisi awal, rubrik tersebut memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe, pengalaman perjalanan Nugroho Notosusanto. Seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia ke London. Britania Raya dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan ketika pertama kali membuat film. (Sularto dan Santoso: 2016)

Pada awal penerbitannya, Frans Seda disarankan oleh Jenderal Ahmad Yani supaya Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana Partai Komunis Indonesia yang berkembang pada kala itu. Namun secara pribadi, Jacob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata dan I.J. Kasimo tidak mau menerima begitu saja, karena mengingat kontekstual politik, ekonomi dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung. (Sularto dan Santoso: 2016)

Tetapi, tekad Partai Katolik menerbitkan surat kabar sudah bulat. Peter Kansius Ojong dan Jacob Oetama ditugaskan membangun perusahaan oleh Bung Karno. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan surat kabar baru, corong Partai Katolik. Tetapi, suhu politik yang memanas saat itu membuat pekerjaan mereka bukan perkara yang mudah. Rencananya, surat kabar ini diberi nama "Bentara Rakyat". Menurut Frans Seda, PKI tahu rencana itu lantas dihadang. Namun, karena Bung Karno setuju akhirnya pergerakan jalan terus hingga izinnya keluar. Frans Seda mengacu pada PKI yang merupakan salah satu partai besar di Indonesia pada dasawarsa 1950-an sampai 1960-an, sehingga PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955. (Sularto dan Santoso: 2016)

Izin sudah dimiliki, tetapi herannya "Bentara Rakyat" tak kunjung terbit. Ternyata rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada perizinan dari Panglima Militer Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja yang belum juga diterima. Kemudian, dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban, izin operasi akan keluar apabila syarat 3.000 tanda tangan pelanggan telah terpenuhi. Akhirnya, para wartawan pergi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang mayoritas penduduk Flores beragama Katolik. (Sularto dan Santoso: 2016)

Nama "Bentara" sesuai dengan selera orang Flores dan ternyata majalah Bentara juga sangat populer di sana. Ketika menjelang terbit pertama kalinya, Frans Seda melaporkan pada presiden Soekarno tentang persiapan terbitan perdana harian tersebut. Namun, dari Presiden Soekarno inilah lahir nama "Kompas" yang berarti adalah penunjuk arah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, para anggota menerima usulan dari Presiden Soekarno dengan mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas. (Sularto dan Santoso: 2016)

Setelah berhasil mengumpulkan tanda bukti 3000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, pada akhirnya Kompas terbit pertama kali pada

tanggal 28 Juni 1965. Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jacob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat halaman dengan iklan berjumlah enam buah. Selanjutnya, pada masa-masa awal berdirinya (Tahun 1965) Koran Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan delapan halaman, lalu terbit empat kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu dua tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar. (Sularto dan Santoso: 2016)

Kompas edisi pertama dicetak oleh P.N. Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Tepat 28 Juni 1965, Kompas mulai diterbitkan untuk pertama kalinya dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat.” Berita utama pada halaman pertama berjudul “Konferensi Asia-Afrika II Ditunda Empat Bulan.” Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri dengan kalimat “Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil”. Di halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jacob Oetama, Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem. Menurut Jacob Oetama, nama P. K. Ojong ketika itu tabu politik. Lagipula, figur Ojong tidak disukai Soekarno. (Sularto dan Santoso: 2016)

Kondisi politik pada saat itu ternyata tak dapat diraih. Pagi hari 30 September 1965, tepat tiga bulan usia Kompas, sebagian warga Jakarta tidak sadar ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dicurigai terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya republik. Sejarah mencatat bahwa kejadian tersebut sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Beberapa harian yang terbit bersama dengan Kompas, mereka tidak terlepas dari upaya untuk memberikan upaya kepada pers yang berafiliasi dengan ideologi kiri seperti PKI, dan rubrik yang dicurigai tidak revolusioner lainnya. (Sularto dan Santoso: 2016)

Sehari setelahnya, Agus Parengkuan dan Ponis Purba yang sedang mendapat giliran tugas malam, diberi tahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta surat kabar lain tak boleh terbit. Hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak terbit tersebut dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan larangan itu dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai pengkhianatan oleh Komando Gerakan 30 September atau Dewan Revolusi, perlu adanya upaya penguasaan terhadap media-media pemberitaan. Ketika itu, Agus Parengkuan dan Ponis Purba tetap yakin Kompas tidak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan, dan di lay out sudah disiapkan bahwa Kompas edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R. E Martadinata. (Sularto dan Santoso: 2016)

Penyerangan terhadap PKI tak juga menyelamatkan Kompas. Kompas baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965. Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga dan iklan baris yang disebut dengan "Klasika". Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. (Sularto dan Santoso: 2016)

3. Pemberitaan Rumah Pada Surat Kabar Kompas

Pada tulisan ini, penulis memilih berita Kompas tentang rumah pada sepanjang dekade 70-an. Pada tahun 1970 pemberitaan yang dimuat adalah tentang persiapan Negara dengan segala kebijakannya untuk mewujudkan lingkungan sehat lewat program pembangunan rumah yang bersih, nyaman, dan rapi. Progres selanjutnya terlihat pada pemberitaan tahun 1973, dimana pemerintah banyak melakukan perjanjian usaha untuk melakukan pembangunan rumah. Seperti bekerjasama dengan perusahaan real estate yang

ada di Indonesia dan perjanjian dengan Belgia. Pada waktu itu rumah dicanangkan dijual dengan harga semurah-murahnya.

Usaha pemerintah terus berlanjut, hingga tahun 1979 surat kabar Kompas memberitakan bahwa Negara sudah mempunyai tiga badan khusus untuk mewujudkan perumahan rakyat. Kemudian ditahun 1975 pemerintah masih mengupayakan pembangunan, namun untuk tahun ini lebih terstruktur. Pemerintah mempunyai tiga program kemajuan, yakni program perbaikan kampung, pematangan lahan untuk pembangunan rumah rupa kavling tanah, dan diberlakukannya program otonomi daerah.

Kebijakan pemerintah terus diperbaiki hingga pada tahun 1976 Kompas kembali memberitakan bahwa rumah murah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya pada tahun 1977 dilakukan penertiban penghunian di perumahan Perumnas. Perumahan Perumnas hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak ada hak rumah ditempat lain. Diwaktu yang sama pula, Belgia memberikan bantuan untuk menyempurnakan program pembangunan Negara di Indonesia melalui program pembangunan rumah.

Kemudian di tahun 1979 pembangunann perumahan Perumnas diratakan di tujuh puluh tujuh kota di Indonesia dengan target 150.000 unit rumah. Ditahun ini pemerintah kuwalahan dalam melakukan pembangunan. Berita kompas menyatakan bahwa pemerintah hanya mampu melayani desakan kebutuhan yang timbul oleh penambahan penduduk. Karena sebab itu, mulailah diberlakukan tabungan jangka panjang bagi orang yang ingin memiliki rumah di perumahan Perumnas.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Struktur Wacana Perumahan di Masa Orde Baru

Dalam menjawab pertanyaan pertama penelitian yakni struktur wacana yang membangun pernyataan-pernyataan dalam teks berita Kompas, penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana wacana perumahan dalam tiga periode, yakni zaman kolonial Belanda dimana wacana perumahan dimulai, stuktur wacana perumahan di masa orde lama dan struktur wacana perumahan di periode orde baru.

1.a. Perumahan di masa Kolonial

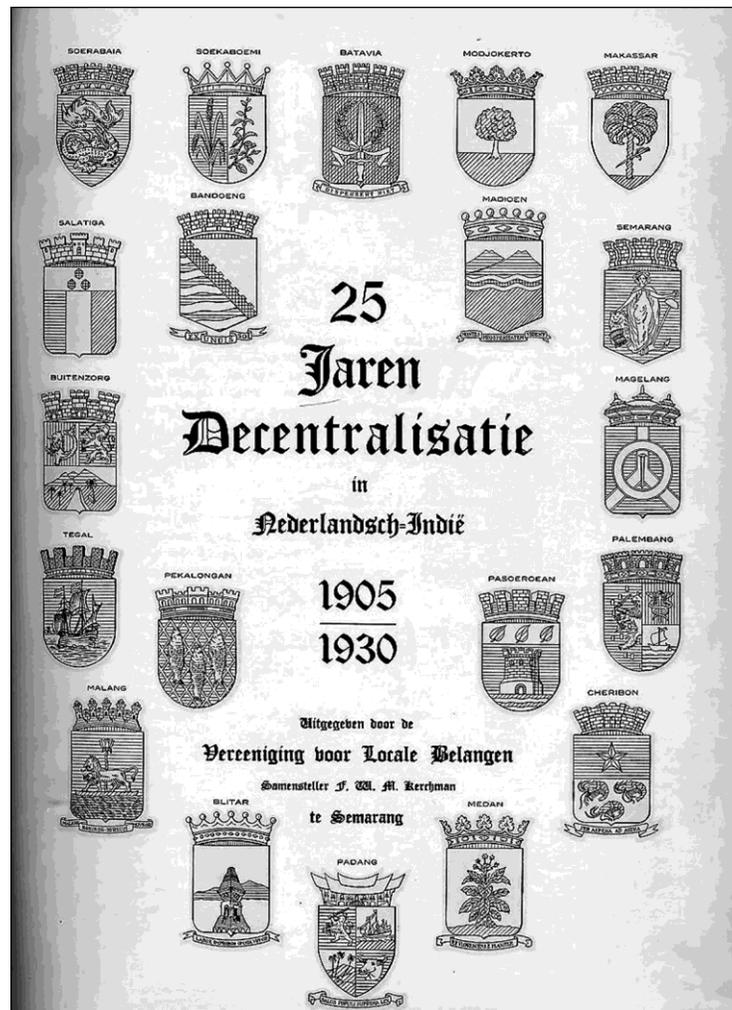
Di Hindia-Belanda, pandangan kebijakan perumahan urban ditentukan pada munculnya kebijakan baru saat pengembangan kolonial. Pada masa kolonial Belanda kebijakan perumahan diatur dalam Burgerlijke Woningenregeling 1934, pelaksanaan kebijakan menggunakan aturan Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van Openbare Werken in Indie 1941 (Syarat dan Ketentuan Umum untuk pelaksanaan adopsi Pekerjaan Umum di India 1941) dan Indische Comptabiliteits We (Hukum Kompatibilitas India). Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh Departement Van Verkeer en Waterstaat (Departemen Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Air Hindia-Belanda) yang menangani perumahan rakyat (Volkshuisvesting) dan gedung/rumah negara/pemerintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan (Wabah Pes). (Suparwoko, 2012)

Pada akhir 1800-an, kondisi sosial di Hindia memburuk. Belanda mengakui beberapa kesalahan karena persyaratan perdagangan. Untuk mengurangi rasa bersalah, Belanda mempromosikan pembangunan

kolonial. Belanda mentolerir dan bahkan mendorong adanya industri manufaktur sepanjang industri tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Karena Belanda tidak *terdiversifikasi* sebagai kekuatan industri seperti Inggris, konflik semacam itu sering terjadi. Inisiatif yang sangat sukses adalah produksi genteng, dipromosikan sebagai alternatif higienis pengganti jerami (Ricard Harris: 2013). Banyak orang Indonesia dengan mudah mengadopsi ubin, meskipun ada biaya yang lebih besar, terutama di daerah perkotaan.

Pada tahun 1901, pidato Ratu Wilhelmina menggembar-gemborkan "*Kebijakan Etis*" yang melibatkan perubahan signifikan dalam tindakan Belanda di Hindia. Ini memerlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur fisik dan modal sosial.

Setelah tahun 1901, Belanda membentuk kebijakan perkotaan dan perumahan di Hindia Belanda. Perubahan terbesar adalah bagaimana kota-kota dijadikan sebagai subjek koordinasi. Sampai sekarang mereka telah dijalankan dari Batavia, namun opini Eropa lokal lebih menyukai desentralisasi dan hal ini diizinkan oleh undang-undang pada tahun 1903 (Ricard Harris: 2013). Kotamadya pada model Belanda segera terbentuk untuk semua pusat kota besar, yang berjumlah 19 di pulau Jawa pada tahun 1921 (Ricard Harris: 2013). Awalnya hanya orang Eropa yang terpilih dan kepentingan Eropa dianggap sangat penting. Namun meski pengaturan baru tersebut tidak melibatkan pergeseran formal dalam keseimbangan etnik, hal itu membuat kebijakan perkotaan lebih responsif terhadap kondisi lokal.



Gambar 1 Judul halaman dari volume yang merayakan ulang tahun ke 25 dari Pemkot di Hindia Belanda. Kota menjadi agen utama kebijakan perumahan dan perbaikan selama tahun-tahun antar-perang. (Ricard Harris: 2013)

Pada 1910-an, beberapa orang Eropa menekan kota-kota baru untuk melakukan "perbaikan" kampung. Pemimpinnya adalah reformis perkotaan H. F. Tillema dan D. J. A. Westerveld di Semarang (Ricard Harris: 2013). Namun Belanda tidak menanggapi, atau bahkan mengantisipasi kerusuhan lokal.

Perbaikan berarti peningkatan area yang penuh sesak dimana sanitasi buruk dan dimana orang mengandalkan sumur. Studi kesehatan di sebuah bangsal Batavia menemukan bahwa pada akhir tahun 1930-an sebuah

pondok khas terdiri dari sekitar 21 unit hunian (biasanya kamar tunggal) di bawah satu atap, masing-masing dengan 3,94 penghuni (Ricard Harris: 2013). Warga 89 persen dari semua tempat tinggal membuang kotoran manusia ke dalam tanah, dan 4 persen masuk ke selokan terdekat. Sebagian besar memiliki akses ke air keran, tapi biasanya dengan membelinya dari penjual jalanan. 10 persen masih mengandalkan sumur (Ricard Harris: 2013). Hasilnya Penelitian tersebut mengerikan: 219 dari setiap 1.000 bayi meninggal dalam waktu satu tahun lahir, 238 di pondokan - ini di bangsal yang lebih baik dari rata-rata pada tahun 1937, dan beberapa perkampungan telah diperbaiki.

Untuk menanggulangi kebutuhan akan peningkatan fisik, pada tahun 1915 gubernur secara rutin mengunjungi kampung yang sangat miskin setiap tahun (Ricard Harris: 2013). Gubernur mengikuti aturan dari pemerintahan kolonial, dan perbaikan kampung umumnya merupakan inisiatif lokal (Ricard Harris: 2013). Dengan demikian, kampanye perbaikan adalah tentang reformasi pemerintah, sanitasi, dan diyakini menjadi sebuah upaya pemulihan yang bergantung pada aneksasi kampung.

Tahun 1924 pemerintah Kolonial Belanda memfasilitasi rumah untuk para pegawainya yang berbentuk loji (Benteng Belanda). Saat itu hanya Belanda yang berhak menghuninya, hingga kebijakan pendirian rumah loji tersebut diberlakukan di Jakarta dan Surabaya untuk kepentingan kolonial Belanda. (Richard Harris: 2013)

Pandangan yang berlaku saat itu dinyatakan secara blak-blakan dalam sebuah panduan promosi yang diterbitkan pada tahun 1926:

"kampung-kampung ... tidak pernah menjadi faktor yang berperan dalam keindahan Batavia; Sebagai gantinya, ini adalah Batavia modern ... dibangun oleh Belanda ... yang sekarang menawarkan gelar 'Ratu Timur' "(Ricard Harris: 2013).

Secara sembunyi, kampung juga dikelola secara terpisah. Belanda memiliki asosiasi lingkungan sendiri (sinoman) yang bertanggung jawab

untuk pemeliharaan fisik dan bantuan timbal balik (Ricard Harris: 2013). Ini adalah warisan pedesaan.

Belanda mulai berpikir serius tentang bagaimana membawa penduduk asli ke rezim perkotaan yang baru. Batavia mempromosikan dirinya sendiri pada tahun 1930an dengan menampilkan gambar-gambar modernitas sambil menyatakan bahwa "*tidak hanya rumah-rumah tetapi juga toko-toko, gedung perkantoran dan hotel telah sangat terpusat*" (Ricard Harris: 2013).

Pada tahun 1932 Belanda melakukan *Renewal kampung* atau perbaikan kampung dengan tujuan pembersihan lingkungan rakyat dan menghindarkan virus penyakit Pes dari loji-loji Belanda. Pembersihan lingkungan yang dilakukan Belanda antara lain berupa perbaikan saluran dan penyuluhan rumah sehat. (perumahan.pu.go.id)

Wabah pes merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri bernama *Yersinia pestis*. Penyakit ini dikenal juga dengan istilah wabah hitam (*black death*). Bakteri tersebut dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Penyakit pes menyebar dengan mudah di area yang padat, area yang dengan sanitasi yang buruk, serta area yang memiliki populasi hewan pengerat yang cukup tinggi. Khususnya tikus, misalnya pedesaan dan semi pedesaan di Asia. (Suparwoko: 2012)



Gambar 2 *Kampung* perbaikan di Semarang, Hindia Belanda, ca. 1930. Belanda menekankan perbaikan kampung (*settlement upgrade*) dan penduduk pajak apakah mereka mampu membelinya. (Sumber: Ricard Harris: 2013)

Kelemahan dari kebijakan perbaikan kampung adalah tidak disertai dengan upaya berkelanjutan untuk membangun perumahan baru. Melainkan diarahkan pada peningkatan drainase, penyediaan air, dan fasilitas kamar-kamar mandi (Ricard Harris: 2013).

Akhirnya dengan konsep desentralisasi, beberapa kota membangun perumahan berpenghasilan rendah, yang paling aktif membangun adalah kota Surabaya (Ricard Harris: 2013), Bandung (Ricard Harris: 2013), Buitenzorg (Karsten: 1958 dalam jurnal *Housing policy for the Colonial City: the British and Dutch Experience*), dan Semarang (Ricard Harris: 2013). Pada awal 1930an, Surabaya telah membangun 163 tempat tinggal bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dengan melakukan upgrade atau pembangunan kembali.

Secara independen, Otoritas Tanah dan Perumahan yang dibentuk pada tahun 1917 telah mendirikan 326 unit pada tahun 1928, setengahnya ditempati oleh penduduk asli. Pada tahun 1935, inventarisnya telah meningkat menjadi 521 rumah dan 10 pondok. Sementara sebuah perusahaan perumahan rakyat mengendalikan 933 rumah dan 332 "*gubuk keren*" dari satu atau dua kamar. Meski tidak memadai, ini bukan prestasi sepele. Untuk kota seukurannya, Semarang lebih aktif membangun. Lima kampung disetujui pada awal tahun 1917.

Pada tahun 1929, sebanyak 6 kota termasuk Lempongsari (239 unit), Sompok (348 unit), dan Oost-Semarang (772 unit), berisi setidaknya 1557 unit pembangunan pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebuah survei menunjukkan bahwa 853 adalah struktur "*semi permanen*", yang ditujukan untuk penduduk asli (Ricard Harris: 2013). Hal ini penting karena rumah-rumah dari bahan-bahan permanen sebagian besar kotamadya harganya cukup terjangkau (Ricard Harris: 2013)



Gambar 3 tempat tinggal semi permanen, Medan, Hindia Belanda, dibangun pada tahun 1920. Meskipun mereka menekankan upgrade dan rumah-rumah biasanya dibangun menggunakan bahan permanen, dalam pusat-pusat kota beberapa, pemerintah setempat berusaha untuk rumah penduduk pribumi. Sumber: (Ricard Harris: 2013).

Pada tahun 1936, Batavia menugaskan sebuah buku besar untuk menyoroti langkah kebijakan. Langkah perlindungan pemerintah terakhir adalah menjadikan kota sebagai pusat industri (Ricard Harris: 2013). Industri yang ada masa itu diantaranya adalah Perusahaan multinasional, termasuk General Motors (mobil), Goodyear (ban), dan Bata (sepatu) Lebih dari bangsa Inggris, Belanda mempromosikan pembangunan kolonial melalui industrialisasi.

Pada tahun 1941, survei di sebuah bangsal di Batavia yang berisi 25.500 penduduk menemukan bahwa 31 persen atapnya terbuat dari ubin (Ricard Harris: 2013). Pada saat itu, Batavia dan Surabaya memiliki berbagai industri skala besar, termasuk produksi bir, semen, ban, dan tekstil.

Pada tahun 1948, Furnivall (1948) dalam jurnal *Housing policy for the Colonial City: the British and Dutch Experience* mengklaim bahwa Kebijakan Etis tersebut mengantisipasi, "*hampir menunjukkan titik*" program yang tersirat di balik Undang-Undang Pembangunan dan

Kesejahteraan Kolonial 1940. Ini adalah "upaya berkelanjutan pertama oleh kekuatan kolonial Eropa untuk menerapkan jenis kebijakan yang saat ini kita anggap sebagai 'perkembangan'.

Wacana rumah sehat pada masa kolonial muncul karena adanya pemikiran kebijakan etis kolonial, walaupun pada kenyataannya kebijakan tersebut masih memberikan hak eksklusif terhadap bangsa Eropa. Wacana rumah sehat pada masa itu digambarkan dengan Belanda melakukan renewal kampung dengan cara pembersihan lingkungan rakyat dan menghindarkan virus penyakit pes dari lingkungan perumahan milik Belanda. Di lain sisi, adanya sistem desentralisasi antar kota (kota bentukan Belanda) yang diberikan hak mengatur kemajuan daerah sendiri dalam semua bidang, termasuk pembenahan dan pembangunan perumahan menjadi poin utama dalam kebijakan lingkungan pada masa kolonial Belanda.

1.b Wacana Perumahan Orde Lama

Indonesia sebagai Negara merdeka memulai pembangunan pada pemerintahan Soekarno. Perhatian utama pembangunan negara pada masa itu adalah sektor papan. Pembangunan tersebut berdasar pada sistem "Berdiri Diatas Kaki Sendiri (BERDIKARI)". Pelaksanaan pembangunan tersebut dirancang selama lima tahun, dan sejarah mencatat itu dengan "Pembangunan Nasional Semesta Berencana". (Roro deres: 2014)

Bung Karno mengemukakan sistem BERDIKARI dengan konsep "Trisakti". Konsep tersebut mengarah pada berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebuah Negara tidak akan mampu berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan jika tidak berdaulat dalam politik. Begitu pula sebaliknya, tanpa berdikari dalam ekonomi, mustahil sebuah Negara dapat mewujudkan kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan. (Roro deres: 2014)

Pembangunan BERDIKARI mencakup pembangunan ekonomi yang lebih memusatkan perhatian pada ekonomi mikro. Konsep ekonomi berdikari bersandar pada dana dan tenaga yang sudah tersedia dan menggunakannya semaksimal mungkin. Bung Karno merencanakan pembangunan ekonomi berdikari dengan meletakkan rakyat sebagai sumber daya sosial pembangunan. Rakyat juga akan menjadi sumber daya ekonomi yang optimal. Misalnya dalam bidang papan, pemerintah orde lama memfokuskan pembangunan negara pada bagaimana rakyat dapat membangun rumah sendiri dengan bahan yang ada di sekitar mereka tinggal (kayu dan bambu yang tumbuh liar), rumah dibangun dengan cara gotong royong. Diharapkan dengan kemajuan ekonomi mikro, perlahan akan dapat membantu kemajuan ekonomi makro. (Roro deres: 2014)

Tujuan pembangunan *Semesta Berencana* adalah tercukupinya segala kebutuhan rakyat. Untuk mendukung hal itu, Soekarno mengambil kebijakan politik dengan memperluas relasi bilateral. Pada masa itu belum ada Undang-Undang Penanaman Modal asing, tetapi kerja sama antar Negara tetap dapat dilakukan dengan dasar Undang-Undang Agraria tahun 1870 pasal 12 : 1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya, 2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan.

Adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah orde lama seakan memberikan angin segar terhadap masuknya modal asing di bidang perkebunan. Banyak pengusaha Eropa berdatangan ke Indonesia. Kemajuan infrastruktur pada tahun 1869 di Eropa dengan dibukanya terusan Suez (memperbolehkan kendaraan air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika) membuat investor asing meningkat. Permintaan karet dunia melonjak, sektor yang bisa dimasuki pemodal asing diperluas, termasuk pada pertambangan dan perbankan. Nilai investasi asing di Hindia Belanda

pada tahun 1930 mencapai empat milyar gulden, atau setara dengan tiga puluh triliyun rupiah kurs saat ini.

Pada masa kemerdekaan, kebijakan perumahan nasional dimulai pada tahun 1947 dengan dibentuknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang membawahi perumahan pada tingkat “Balai Perumahan”. Di pusat, struktur kelembagaan Kementrian dibagi sesuai tugas dan fungsi pada tingkat Jawatan, Balai, dan Bagian, sedangkan kelembagaan di daerah mengikuti struktur pada jaman penjajahan Jepang (kebijakan perumahan ditangani oleh Doboku yang merupakan lembaga pengganti Departement Van Verkeer en Waterstaat (KEMENPERA (Kementerian Perumahan Rakyat), 2009)). Sebagian lain, mengikuti organisasi jaman kolonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan. Balai Perumahan antara lain membawahi *Centrale Stichting Wederopbouw*, diantaranya di Jakarta untuk penanganan pembangunan perkotaan dengan cabang-cabangnya dalam bentuk *Regionale Opbouw Bureau* yang membangun kota satelit Kebayoran. (Suparwoko: 2012)

Tahun 1950 pemerintah orde lama mengadakan *Kongres Perumahan Rakyat Sehat* di Bandung. Harapannya dengan adanya kongres tersebut dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan papan. Kongres rumah Sehat tersebut dihadiri oleh para perwakilan dari enam puluh tiga Kabupaten dan Kotapraja, empat Propinsi, wakil dari departemen Pekerjaan Umum, Perwakilan Organisasi Pemuda, kelompok Tani, Pengurus Parindra, dan tokoh-tokoh perseorangan. Forum tersebut membahas tentang pembangunan cepat, bahan untuk pembangunan perumahan rakyat, bentuk perumahan rakyat, kepentingan kesehatan dalam membangun rumah rakyat, pembiayaan perumahan, serta peninjauan peraturan-peraturan tentang ketentuan dalam mendirikan rumah dinas di kotapraja dan kabupaten dan persediaan tanah perumahan. (Suparwoko: 2012)

Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung menghasilkan beberapa pokok keputusan. Yakni: 1) mengusulkan dirikannya perusahaan, 2) mengusulkan penetapan syarat-syarat minimal bagi pembangunan perumahan rakyat, dan 3) mengusulkan pembentukan badan/lembaga yang mengurus perumahan. Kongres ini juga menjadi langkah awal semangat pembangunan pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi rakyat Indonesia. Pada kongres tersebut diatur pula peraturan standar minimum rumah layak huni untuk rakyat. Namun hal tersebut menyebabkan orang malas membangun rumah, sehingga malas juga untuk berurusan dengan Kantor Urusan perumahan (KUP). (PU-NET, Perumahan.pu.go.id)

Kantor urusan perumahan adalah salah satu dari wujud hasil Kongres tentang Rumah di Bandung yang pada masa itu tiap regional mempunyai pusat informasi masing-masing di tiap daerah. Badan ini sekarang kita kenal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (KEMENPUPERA RI). Pada posisi ini rumah seakan dipersulit oleh pemerintah untuk rakyat peroleh.

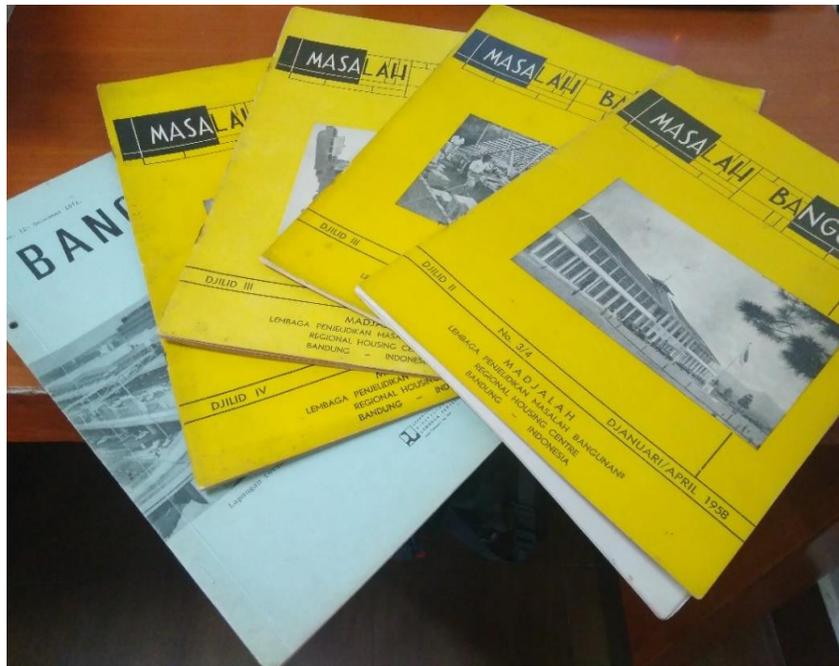
Pada tahun 1955 diterapkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tujuan mengisi kas Negara. Pajak ini diambil dari kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih bagi orang atau badan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Saat ini, dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. (Ditjen Pajak RI, www.pajak.go.id)

Sebuah tempat diidentifikasi sebagai “*Rumah (Perumahan)*” jika tempat tersebut mempunyai:

1. Alamat rumah yang jelas, dimana alamat tersebut dapat menjadi patokan lokasi rumah.
2. Bentuk rumah
3. Terdapat pasokan air mandi
4. Pencahayaan yang cukup, dan
5. Dapur (Majalah Regional Housing Centre Januari/April 1958 hal. 21)

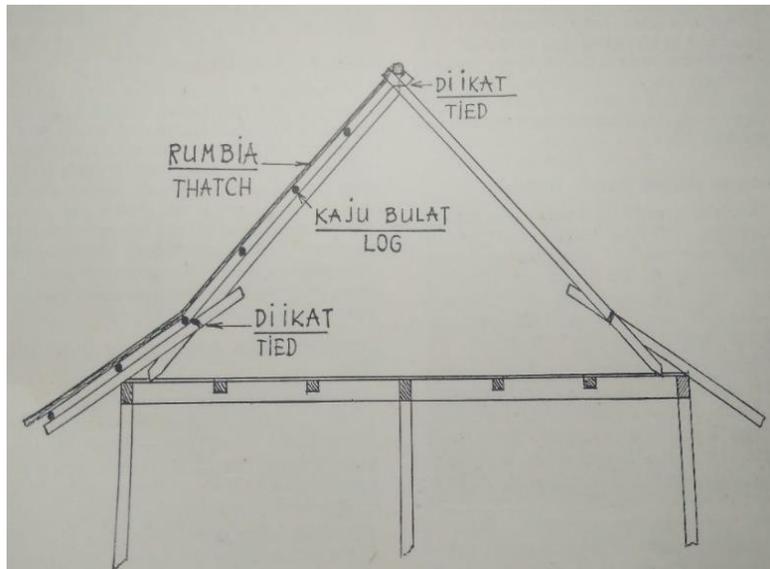
Rumah direpresentasikan bukan lagi sebagai barang privasi keluarga, melainkan kebutuhan rakyat yang sedang diusahakan oleh Negara. Oleh karena itu Negara melakukan intervensi terhadap “*Rumah*”. Mulai dari bahan material bangunan, cara membangun rumah, aturan dasar lingkungan yang sesuai dengan konteks layak huni (mengacu pada bidang kedokteran) hingga pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan.

Soekarno membentuk Regional housing Centre dan Lembaga Penelitian tentang rumah di Bandung yang berfungsi sebagai United Nation Regional Housing Centre di Bandung. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memiliki rumah sendiri. Langkah pertama yang dilakukan Regional Housing Centre adalah menginformasikan bagaimana cara membuat rumah dengan bahan-bahan material pembangunan. Contoh besi, baja, kayu dan bambu. Dalam hal ini Regional Housing centre mengeluarkan majalah bangunan sebagai media publikasi.

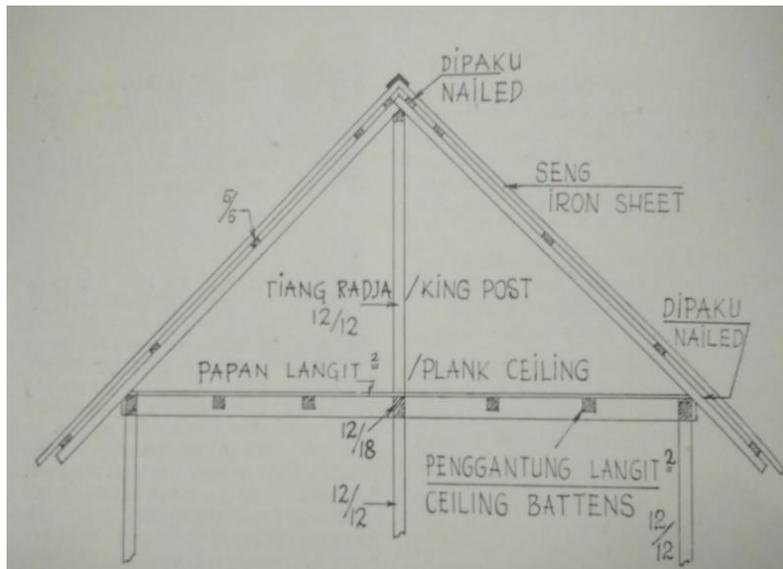


Gambar 4 Majalah Regional Housing Centre
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

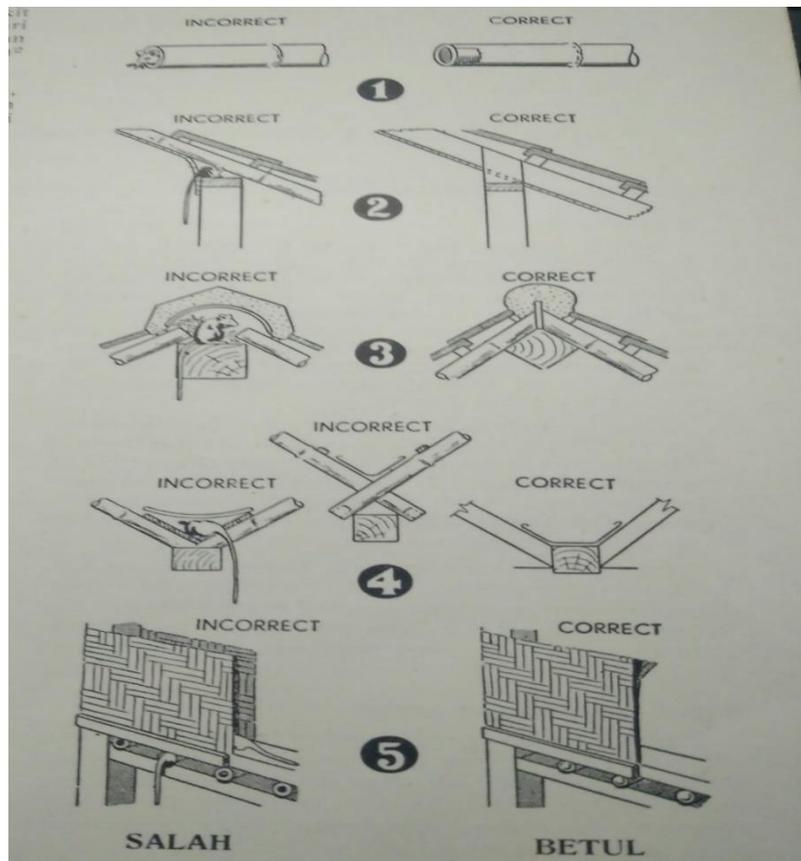
Majalah tersebut memuat tentang bagaimana menggunakan teknik membangun rumah dengan kayu, bambu, paku, besi dan baja dengan baik agar rumah dapat diukur ketahanannya. Karena setiap daerah memiliki letak geografis dan budaya yang berbeda. Maka dari itu untuk menentukan bahan bangunan yang cocok untuk setiap daerah perlu adanya pengkajian sosial dan bahan material pembangunan yang cocok.



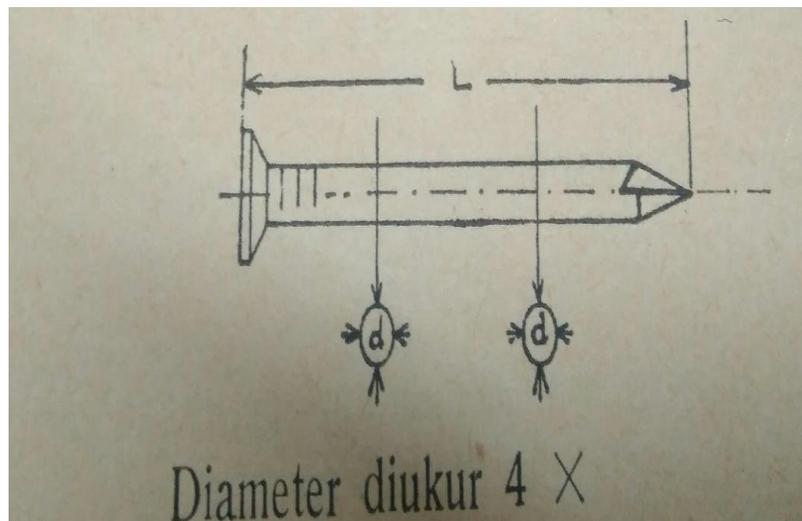
Gambar 5 Kontruksi Kayu Lama
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis



Gambar 6 Kontruksi Kayu Baru
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis



Gambar 7 Kontruksi Bambu
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis



Gambar 8 Pengukuran Paku
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Melihat dari cara sosialisasi pemerintah akan pembangunan rumah rakyat, pada masa itu pembangunan rumah seakan dijadikan jalan untuk menanamkan sikap *nasionalisme*. Yakni rumah yang digambarkan pada Majalah Masalah Bangunan Regional Housing Centre dilakukan dengan bahan bangunan yang tersedia di daerah tempat rakyat tinggal. Baik sumber daya alam seperti kayu atau bambu ataupun barang siap pakai tetapi milik perusahaan lokal daerah setempat.

Kebutuhan papan pada masa itu menjadi fokus utama oleh Soekarno. Disamping Soekarno adalah insinyur lulusan sekolah teknik Hindia-Belanda, pembangunan Negara dilakukan dengan dasar kesejahteraan rakyat yang dilihat dari bidang kesehatan lingkungan tempat tinggal rakyat.

Majalah masalah bangunan yang diterbitkan oleh Regional Housing Centre tahun 1958 memuat tentang pidato Prof. C Theodore Larson, dimana pidato tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat untuk melakukan perubahan. Beliau juga memperkirakan bahwa perubahan kemajuan negara Indonesia dapat ditempuh hanya dengan waktu dua puluh tahun, sementara dua ratus pada Amerika Serikat.

Prof. C . Theodore Larson sendiri adalah perofesor arsitektur pada Universitas Michigan, US. Beliau juga senior konsultan Perserikatan Bangsa-bangsa pada lembaga Penyelidikan Masalah-Masalah Bangunan di Bandung. Pidato tersebut pernah dimuat sebelumnya oleh majalah P.I.I Tahun ke-4 no. 18 pada Mei 1957. Beliau menyampaikan beberapa masalah perumahan dan perencanaannya di Indonesia. Diantaranya adalah kesulitan arsitektur, faktor waktu, dan cara membangun rumah di Indonesia pada masa itu.



Gambar 9 Berita Prof. Theodore
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Pada majalah yang diterbitkan oleh Regional housing Centre itu, dimuat kembali tentang pidato Prof. Theodore yang menyatakan bahwa arsitektur pembangunan rumah di Indonesia yang saat itu dilakukan tidak sesuai dengan Negara Indonesia atau tidak memunculkan khas bangsa Indonesia. Sementara Indonesia sendiri memiliki banyak budaya yang bisa diapresiasi dengan wujud ornamen rumah.

Bangsa Indonesia terkenal memiliki banyak budaya, semua unsur-unsur kebiasaan dan cerita rakyat membentuknya menjadi sebuah sejarah baik lokal maupun Nasional. Lebih mudahnya budaya tradisional tersebut akan membentuk lingkungan tradisional juga yang dapat diwujudkan dengan ornamen rumah. Begitu pula seterusnya. Ketika budaya A yang menjadi rutinitas kehidupan, maka lingkungan tersebut akan membentuk lingkungan

berasaskan A yang dapat digunakan dasar dalam pembangunan rumah (Tipple Graham Dan Kinneth G Willis: 43)

Arsitektur yang sesuai dengan khas bangsa Indonesia adalah model “*Gaia*” dimana model tersebut adalah memanfaatkan apa yang dibutuhkan perseorangan dalam membangun rumah. Contoh rumah sebagai tempat beristirahat dari lelah dan melepas penat. Maka faktor utama yang membentuk adalah lingkungan rumah itu sendiri, spirit atau motivasi yang ingin dihadirkan pada bangunan rumah, dan kesehatan rumah (Christina E. Madiasca : 2005)

Pada majalah “Masalah Bangunan” Edisi Januari/April 1958 memuat bagaimana rumah rakyat tradisional di Sulawesi Selatan. Pada majalah “Masalah Bangunan” Edisi pada edisi Oktober/November 1958 juga memuat bagaimana rumah rakyat tradisional di Minahasa. Kedua daerah tersebut mendapat perlakuan yang berbeda untuk membangun rumah. Karena pada masa itu pembangunan yang dilakukan sesuai dengan iklim, keadaan geografis, sosial budaya dan unsur-unsur lain yang mendukung suatu daerah.

Untuk daerah Sulawesi Selatan, pembangunan rumah dilakukan dengan bahan kayu. Itulah mengapa majalah tersebut juga memuat tentang pemikiran untuk membudidayakan kayu. Karena diharapkan rakyat dapat membangun rumah sendiri dengan bahan yang paling dekat dan gampang dicari dalam keseharian hidup rakyat.

Mengingat akan kenjataan² ini, baik dipandang dari sudut persediaannya (availability) maupun penggunaannya, sudah sewajarnya apabila kita lebih menjurahkan perhatian kedalam soal ini.

Sebagai langkah pertama, perlu kita perhatikan 3 pokok utama :

- (1) Penanaman bambu yang lebih meluas dan lebih teratur, menurut petunjuk² dari para ahli.
- (2) Usaha memperpanjang masa pemakaian (keawetan) bambu.
- (3) Memperbaiki konstruksi rumah.

Gambar 10 Berita Program Budidaya Bambu
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Lain halnya dengan rumah rakyat yang ada di Minahasa, dimana pemerintah lebih aktif memberikan kampanye untuk menggunakan bahan bangunan yang tersedia di daerah Minahasa guna membantu eksistensi perusahaan-perusahaan bahan bangunan. Pasalnya masyarakat Minahasa lebih bangga membangun rumah dengan bahan material yang didatangkan dari luar pulau Sulawesi.

Regulasi kebijakan terus berlanjut hingga dikeluarkan Ketetapan MPRS No. 2 / 1960 bahwa: 1) Dalam bidang perumahan hendaknya membangun rumah sehat, murah, nikmat, dan memenuhi syarat-syarat kesesuaian, 2) Penyelenggaraan perumahan diselenggarakan, 3) Pembangunan fasilitas perumahan oleh pemerintah. Hal ini semakin mempertegas bahwa rumah telah bergeser menjadi barang umum pemerintahan sosialis sebagai bentuk pembangunan Negara dalam naungan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekrit Presiden.

Wacana rumah sehat pada orde lama adalah pengulangan wacana dari zaman kolonial. Wacana rumah sehat tersebut mengarahkan pada rumah yang layak huni dengan kondisi sanitasi yang memadai. Soekarno

melakukan pengarahan kepada masyarakat dengan diadakannya lokakarya rumah sehat di Bandung, dimana dalam lokakarya tersebut dibahas tentang kondisi kelayakan rumah. Dalam hal ini Soekarno mengemas wacana *Rumah Sehat* dengan memberikan contoh konstruksi mendirikan bangunan.

1c. Wacana Perumahan Orde Baru

Masa Orde Baru dimulai dengan berlakunya surat perintah sebelas maret atau yang sering dikenal rakyat dengan SUPERSEMAR. Surat tersebut dituliskan sejarah sebagai surat perintah presiden Soekarno kepada presiden Soeharto untuk meneruskan kepemimpinan Negara.

Kepemimpinan Soeharto dinilai kepemimpinan yang otoriter kepada rakyat. Pasanya seluruh pembangunan Negara dalam segala aspek didasarkan pada kebutuhan Negara. Salah satunya adalah dalam hal papan, yakni penyediaan rumah untuk rakyat. Rumah adalah sebuah kebutuhan keluarga untuk tempat tinggal, dimana kebutuhan rumah harusnya dipikirkan oleh keluarga kini dipikirkan oleh pemerintah pada masa orde baru.

Zaman orde baru dianggap zaman pemerintahan pembangunan berstruktur hingga lima kali periode. Pembangunan tersebut dikenal dengan “Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)”. Pembangunan tersebut dilakukan dari banyak aspek pendukung, diantaranya aspek pangan, papan, ekspor dan impor.

Pemerintahan Orde Baru dinilai memberikan kesuksesan terhadap Negara. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia pernah berhasil memperoleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 10.000 dollar ditahun 1996. Dimasa itulah Indonesia berada di kondisi ekonomi yang stabil, sehingga investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia (Taufik Adi Susilo: 2016)

Kepemimpinan Soeharto juga dianggap sebagai kepemimpinan dinasti bagi beberapa daerah. Hal itu dikarenakan partai golkar memenangkan lima kali periode pemilu, sehingga pada masa itu rakyat yang

ingin melakukan apapun harus disumpah membela partai Golkar. Misalnya siswa baru yang akan masuk sekolah, wajib menjalani sumpah membela partai Golkar.

Negara melakukan pembatasan gerak terhadap media baik cetak maupun elektronik. Media apapun harus pro dengan pemerintah, banyak seniman yang dipenjarakan, kemudian banyak buku pula dihanguskan pada masa itu, sehingga secara tidak langsung pemerintahan Soeharto menginginkan segala kerja pemerintah selalu benar dan selalu dipandang positif.

Tahun 1968 Indonesia membentuk badan perencanaan dan pembangunan (BAPPENAS). Badan tersebut bertgas merancang pembangunan apa yang harus didahulukan untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Guna keperluan perencanaan pembangunan ekonomi, berbagai delegasi Negara dikirim untuk melakukan pinjaman. Salah satu pinjaman tersebut ditujukan kepada Negara Uni Soviet, dimana pinjaman tersebut masih ditangguhkan. Karena dianggap pinjaman dan kerja sama yang diajukan oleh Indonesia nilainya terlalu besar. Namun disaat yang sama, perjanjian dengan Jepang berjalan mulus bahkan berkembang dalam berbagai bidang.

Dalam bidang pertanian, Indonesia dimasa pemerintahan Soeharto menjadi *Negara Lumbung Padi*. Pada masa itu Indonesia dapat dengan mudah mencukupi kebutuhannya akan beras. Bahkan Indonesia mampu melakukan ekspor beras. Dibidang infrastruktur, pada pemerintahan Soeharto Indonesia dapat membuat pesawat sendiri yang kemudian dipercayakan kepada B.J. Habibie yang merupakan wakil presiden Soeharto terakhir.

Dalam bidang perjanjian bilateral antar Negara, Indonesia pada kepemimpinan Soeharto bekerja sama dengan banyak Negara dan dalam banyak bidang untuk pembangunan Negara. Antara lain Jepang dan Belgia. Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam bidang properti.

Pada tahun 1969 Indonesia telah bekerja sama dengan Jepang. Pada masa itu Indonesia bekerja sama dalam membangun pabrik minyak di Bandung (Indonesia Raya edisi 9 september 1969)



Gambar 11 Pemberitaan Pinjaman Indonesia

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis



Gambar 12 Berita Kerjasama Jepang
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Tahun 1974 mulai dibentuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi tertentu untuk percepatan pembangunan permukiman di tanah air, lembaga yang dibentuk antara lain:

- a. Pembentukan badan kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) dengan keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1974.
- b. Pendirian Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum PERUMNAS) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974.
- c. Tentang pembiayaan perumahan, Menteri Keuangan dengan surat Menti Keuangan Nomor B-49/MK/IV/1/1974 menugasi Bank Tabungan Negara (BTN) untuk berfungsi sebagai Bank yang memberikan kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah sederhana yang dibangun oleh Perum

PERUMNAS dan perusahaan pembangunan perumahan swasta (developer perumahan)

- d. Pembangunan perumahan oleh sektor swasta ditingkatkan dan dikembangkan melalui Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI)
- e. Pembangunan Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB) sebagai pusat penyuluhan pembangunan perumahan dan bangunan dibentuk di seluruh ibukota Provinsi. (Yudohusodo, S , dan Salam, S.,1991 dalam buku - Pembangunan Perumahan Swadaya di Indonesia)

Disamping perumusan kelembagaan yang mengurus bidang pembangunan perumahan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program, diantaranya:

- a. Perintis program perbaikan kampung.
- b. Pengadaan tanah matang untuk pembangunan perumahan (site and services) walaupun masih dalam skala kecil.
- c. Perintis pembangunan rumah sederhana.
- d. Proyek perintis Pemugaran Perumahan Desa (P3D) sebagai suatu usaha untuk program pembangunan perumahan di pedesaan. (Yudohusodo, S , dan Salam, S.,1991 dalam buku Pembangunan Perumahan Swadaya di Indonesia)

Pemerintahan Soeharto terkenal dengan pendirian PERUMNAS. Perum Perumnas merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan perumahan dan permukiman bagi masyarakat menengah ke bawah Indonesia. PERUMNAS berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dengan keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004.

Pada tahun-tahun awal pembentukannya, PERUMNAS telah melakukan usaha pembangunan kawasan baru di hampir semua kota besar. PERUMNAS menjadi *pioneer* pengembangan kawasan permukiman berskala besar yang berkembang dan tumbuh menjadi kota baru. Adanya proyek-proyek pengembangan permukiman PERUMNAS di berbagai wilayah menghasilkan *multiplier effect* yang luar biasa terhadap pengembangan kawasan sekitarnya. Helvetia di Medan, Ilir Barat di Palembang, Banyumanik di Semarang, Tamalanrea di Makassar, Dukuh Menanggal di Surabaya, Antapani di Bandung adalah contoh permukiman skala besar yang pembangunannya dirintis PERUMNAS.

Kawasan permukiman tersebut kini telah berkembang menjadi kota baru yang prospektif. Selain itu, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga merupakan "Kota Baru" rintisan PERUMNAS yang berkembang pesat menjadi kawasan strategis dan kawasan pendukung ibukota.

Pembangunan rumah di masa kepemimpinan Soeharto melibatkan banyak Negara. Selain memperbanyak relasi, Indonesia juga mengembangkan sayap dalam hal penanaman modal. Terutama penanaman modal asing. Pada tahun 1967 pemerintah Orde Baru menyempurnakan aturan untuk para penyedia modal asing dengan aturan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada peraturan tersebut dibahas lengkap tentang hak dan kewajiban investor asing.

Pemerintahan Soeharto melakukan hubungan Bilateral dengan Negara Belgia dalam rangka melanggengkan pembangunan. Perjanjian dengan Belgia meliputi *feasibiling study* dan *detail engineering*. Alasan mendasar perjanjian dengan Belgia adalah telah terjalinnya ikatan persaudaraan Negara yang sangat baik tanpa cacat berawal dari forum Konferensi Tiga Negara (KTN). Dilain sisi pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sudah lebih dulu mengimpor bahan-bahan kimia untuk kemajuan pertanian dari Belgia. Diantaranya adalah pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. (KBRI Brussel)

Tak hanya itu, ditahun 1969 Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto juga melakukan hubungan Bilateral dengan Rusia. Pada masa itu bentuk kerja sama Indonesia-Rusia adalah pengajuan pinjaman. Namun Rusia menanggukhan pinjaman dari Indonesia yang direncanakan untuk dana membangun rumah rakyat (Indonesia Raya edisi 9 september 1969).

Pembangunan perumahan telah digariskan dalam GBHN 1978. Pada dasarnya pemerintah melaksanakan pembangunan perumahan rakyat yang harganya terjangkau oleh rakyat. Dirilisnya kelembagaan baru seperti Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dan PT Papan Sejahtera menandai progres pemerintah untuk fokus pada pembangunan perumahan. Beberapa kebijakan telah dicetuskan untuk menyempurnakan pembangunan perumahan diantaranya :

- a. Peningkatan dan pemanfaatan hasil riset bahan bangunan yang dapat diproduksi di Indonesia dan yang memenuhi persyaratan bagi pembangunan permukiman.
- b. Peningkatan pembinaan usaha industry bahan bangunan lokal dan pembangunan perumahan dalam jumlah besar dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat banyak.
- c. Adanya sistem pembiayaan yang lebih efisien dan efektif untuk merangsang dan membantu pembangunan perumahan serta kepemilikannya, antara lain melalui sistem KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
- d. Perluasan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan rakyat.
- e. Peningkatan bimbingan teknik dan penyuluhan dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa.
- f. Mempersiapkan unsur-unsur kelembagaan dan landasan hukum bagi peraturan yang akan mengarahkan pembangunan perumahan dalam lingkup nasional. (Yudohusodo, S , dan

Salam, S.,1991 dalam buku Pembangunan Perumahan Swadaya di Indonesia)

Dari kebijakan diatas, beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah orde baru diantaranya:

- a. Program perbaikan kampung melalui perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota.
- b. Pembangunan rumah sederhana dalam jumlah yang lebih banyak untuk menjangkau kalangan MBR.
- c. Perintisan pembangunan rumah susun (Percontohan)
- d. Mulai dikembangkan sistem peremajaan kota
- e. Peningkatan dan pengembangan Proyek Perintis Pemugaran Perumahan Desa (P3D) hingga menyentuh 6000 lokasi desa.
- f. Pengembangan program Peningkatan Swadaya Masyarakat dalam Perumahan dan Lingkungan (PSMPL). Program ini sebagai cikal bakal pembangunan perumahan yang berbasis pada masyarakat/swadaya.
- g. Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa (PPLI). (Yudohusodo, S , dan Salam, S.,1991 dalam buku - Pembangunan Perumahan Swadaya di Indonesia)

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang lebih mengedepankan kemajuan ekonomi mikro, Soeharto menarik kemajuan ekonomi dengan mengedepankan ekonomi makro. Misalnya dalam hal pembangunan rumah, Soekarno mengkampanyekan membangun dengan bahan yang lebih dekat dengan daerah hidup rakyat. Tetapi di pemerintahan Soeharto rumah diibaratkan produk jual-beli yang ditangani langsung oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah Soeharto termasuk pemerintahan bersistem ekonomi kapitalis.

2. Praktik Wacana Perumahan di Kompas

Berita yang digunakan untuk menganalisis wacana rumah dikompas adalah berita tentang rumah pada tahun 1970 sampai 1979. Lebih jelasnya sebagai berikut:

NO	EDISI	JUDUL	ISI
KOMPAS TAHUN 1970			
1	Kamis, 22 Januari Hal. 2	PT. "DjakartaHousing" Tahun ini Membangun 150 Rumah untuk Umum	Gabungan dua perusahaan real estate antara Indonsia (PT. 51) dn Jepang (PT. Tosho Sangyo Co. Ltd) akan mendirikan 150 perumahan dengan 4 tipe rumah yang berbeda dengan modal pembangunan perumahan dari Indonesia 30% dan dari jepang 70%
2	Senin, 2 Maret Hal. 2	Konsepsi Rumah Sehat Mulai Ditjoba di Djakarta	Direktorat perumahan melakukan percobaan terhadap 4 rumah sebagai contoh hasil dari konsep rumah sehat. Baik dari perawatan lingkungan dn cara pembuatannya
3	Rabu, 15 April Hal. 2	Proek Perumahan Masih Tertunda	Projek perumahan "Djakarta Hosing" tertunda karena belum adanya pengesahan surat ijin usaha pembangunan dari DepKeu walaupun sudah mendaatkan rekomendasi dari PUTL

4	Jum'at, 31 Juli Hal. 2	Harga-harga Rumah Proyek Tjipinang Jaya	Perusahaan Tanah dan Bangunan DCI Djaya mulai menjual rumah dengan cara kontan dan boleh dicicil. Pad waktu itu listrik belum terpasang tetpi akan diusahakan terpasang secepatnya
KOMPAS TAHUN 1973			
5	Rabu, 14 Maret Hal. 3	Perusahaan ² Real Estate Akan Membangun Rumah Murah Tahun 1973	Indonesia membentuk kelompok yang terdiri dari semua Perusahaan Real Estate di indonesia untuk membangun rumah murah dengan lingkup bidang mematangkan tanah, menjualnya atau menyewakan bangunan
6	Selasa, 28 Agustus Hal. 8	Kerjasama Proyek Rumah Murah dengan Belgia	Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Belgia dalam 1)Proyek Rumah Murah 2)Proyek Pusat Dokumentasi dan Informasi tentang Perencanaan Kota dan Regional
KOMPAS TAHUN 1974			
7	Jum'at, 8 Maret Hal. 4	Menuju Penghapusan Sistim Kontrak Pembangunan Perumahan PELITA II	Pemerintah akan mengusahakan membangun rumah untuk rakyat dengan jumlah memadai agar kebutuhan rakyat terhdap rumah dan tempat tinggal segera terpenuhi

8	Senin, 22 Juli Hal. 1	Tiga Badan khusus untuk Usahakan perumahan Rakyat	Pemerintah membentuk tiga badan khusus untuk mengusahakan rumah rakyat. Yakni: 1)otorita Perumahan Nasional 2)Bank hipotik Perumahan 3)Perum Pembangunan Perumahan
9	Sabtu, 3 Agustus Hal. 3	Dibangun 10.000 Rumah Rakyat di Jakarta Bantuan Bank Dunia	Pembangunan tidak hanya terpusat pada rumah rakyat, melainkan juga pada bangunan sekolah untuk menunjang pendidikan rakyat saat PELITA II. Pembangunan rumah rakyat sementara baru dilakukan di Jakarta
KOMPAS TAHUN 1975			
10	Rabu, 24 Desember Hal. 4	Dalam Tahun 1975 yang Menjelang Silam Tuntutan Prasarana Diusahakan Pemenuhannya	Progres kerja yang konkrit dari Departemen PUTL dalam bidang papan dan segala hal yang menunjangnya
11	Rabu, 12 Februari Hal. 8	Tiga Program Perum Pembangunan Perumahan Nasional	Tiga program utama PERUMNAS dalam hal pembangunan Negara, yakni: 1)membantu program perbaikan kampung 2)melaksanakan program pematangan dan penyediaan tanah untuk perumahan rakyat berupa kaveling-kaveling dengan fasilitas lingkungan secara minimal

			3)membangun proyek perumahan rakyat
KOMPAS TAHUN 1976			
12	Sabtu, 15 Mei Hal. 5	Perumahan Rakyat dan Masalahnya	Kendala pembangunan masih pada kurangnya modal untuk pembangunan
13	Rabu, 16 Juni Hal. 1	Perumahan Murah bagi Mereka yang Berpenghasilan Rendah	Presiden soehartomembuat keputusn bahwa rumah yang sedang digarap oleh PERUMNAS diutamakan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah
14	Jum'at, 29 Oktober Hal. 7	Iklan "Sunrise Garden"	Iklan dengn segala fasilitas yang ditawarkan dan disertai gambar denah kasar
KOMPAS TAHUN 1977			
15	Kamis, 5 Mei Hal. 2	Menteri PAN: Segera Diterbitkan, Penghunian di Perumahan perumnas	Sasaran hunian adalah Pegawai Negeri golongan I dan II, ABRI, Pensiunan, swasta yang memerlukan dan mereka yang tergusur oleh proyek pemerintah
16	Sabtu, 10 September Hal. 2	Bantuan Belgia untuk Proyek Perumahan Murah Perumnas	Belgia memberikan bantuan untuk melakukan feasibility study dan detail engineering bagi proyek perumahan murah PERUMNAS
KOMPAS TAHUN 1978			
17	Selasa, 14 Februari	BTN Akan Sediakan	BTN membuat kesempatan untuk

	Hal. 2		instansi swasta melakukan kredit perumahan. Dengan ini diharapkan selanjutnya BTN dapat menyediakan untuk swasta perseorangan
KOMPAS TAHUN 1979			
18	Jum'at, 27 April Hal. 1	77 Kota Dijangkau Perumnas untuk 15.000 Unit Rumah	Pada PELITA III jangkauan pembangunan perumahan ditambah sebagai progres kerja pembangunan
19	Rabu, 29 Agustus Hal. 5	Pemerintah Hanya Mampu Layani Desakan Kebutuhan yang Timbul oleh Pertambahan Penduduk	Pengadaan tanah dan modal untuk melakukan pembangunan menjadi halangan Negara untuk menyediakan rumah rakyat
20	Selasa, 4 September Hal. 6	Sistim Tabungan Bertarget salahsatu Jawaban terhadap Masalah Pengadaan Perumahan Rakyat	Pemerintah memulai tabungan bertarget untuk pengadaan rumah rakyat

Tabel Isi berita Kompas

2 a. Posisi Negara sebagai Pengatur Perumahan

Pemerintah orde baru memulai pembangunan Negara dengan melakukan hubungan bilateral berupa pembangunan rumah. Rumah disini direpresentasikan sebagai barang yang dibutuhkan rakyat, sehingga pemerintah ikut andil dalam menyediakannya. Penyediaan rumah rakyat pada awalnya memprioritaskan para pegawai negeri yang menjabat pada

masa itu. Sehingga rumah rakyat bisa dikatakan sebagai fasilitas Negara untuk para pegawainya.

Sasaran program pembangunan rumah rakyat disesuaikan dengan berbagai golongan rakyat. Oleh karena itu sasaran pembangunan perumahan di kota adalah:

1. Bagi yang berpenghasilan sangat rendah dan bertempat tinggal di daerah perkampungan, diusahakan perbaikan kampung (KIP)
2. Bagi yang berpenghasilan rendah, penyediaan tanah beserta fasilitas lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga dapat dibangun rumah tumbuh
3. Bagi yang berpenghasilan sedang diusahakan rumah sederhana (low cost housing)
4. Bagi yang berpenghasilan menengah tinggi usaha ditujukan pada pemberian perangsang bagi pembangunan perumahan oleh pihak swasta

Hal ini merupakan statement yang dibawa Indonesia dari masa kolonial Belanda. Tahun 1924 pemerintahan kolonial memfasilitasi rumah untuk pegawai pemerintahan Belanda. Disusul kebijakan selanjutnya, ditahun 1925 pembentukan Kampung Improvement Program (KIP) pertama di Surabaya (*Kampung Verbetering*) yang ditujukan untuk kepentingan Belanda yaitu *Empowerment* (pemberdayaan). Kemudian pada tahun 1926 Pembangunan perumahan rakyat “Loji”, yakni rumah besar milik pejabat Belanda. Kebijakan ini dilakukan Belanda atas dasar tanggung jawab sosial kolonial. (Peumahan.pu.go.id)

Kepemimpinan Soeharto memposisikan Negara sebagai kepentingan utama. Tidak terkecuali tentang kebijakan pembangunan rumah. Setelah melihat persamaan kebijakan dua masa kepemimpinan yang berbeda antara masa kolonial dan orde baru, bisa dikatakan bahwa kebijakan pada masa orde baru adalah sebuah pengulangan kebijakan yang ada pada masa

kolonial. Yakni barang privasi “*Rumah*” diusahakan pembangunannya oleh pemerintah.

2 b. Wacana Rumah Sehat

Tahun 1970 rumah diartikan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat yang nantinya akan disusun indikator kesehatan dan kelayakan oleh pemerintah. Sehingga standar tersebut dapat dijadikan ukuran pembangunan Negara. Kata “*Rumah Sehat*” mulai muncul sebagai kampanye awal pemerataan penduduk dalam hal papan dan kesehatan yang memang menjadi fokus dari pemerintah orde baru program PELITA II.



Gambar 13 Berita Rumah Sehat
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Wacana “Rumah Sehat” sebenarnya telah muncul pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1932 pemerintah Belanda melakukan *Renewal Kampung* dengan perbaikan saluran dan penyuluhan rumah sehat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif pemerintah kolonial Belanda untuk mencegah pemukiman Belanda tertular wabah pes. Sedangkan pada masa itu wabah pes sedang menjangkit daerah Asia, termasuk Indonesia.

Pemberitaan perumahan di Kompas lebih pada progres yang telah dilakukan pemerintah orde baru dalam melakukan kebijakan. Subjek yang diangkat oleh Kompas selalu dari anggota pemerintah bagian departemen PUTL (sekarang KEMENPUPERA RI). Hal ini menandakan bahwa pemerintahan Indonesia pada masa orde baru melakukan intervensi terpusat mengenai kebutuhan papan. Kemudian intervensi tersebut dijadikan sebuah kebijakan Negara sebagai langkah melakukan pembangunan Negara.

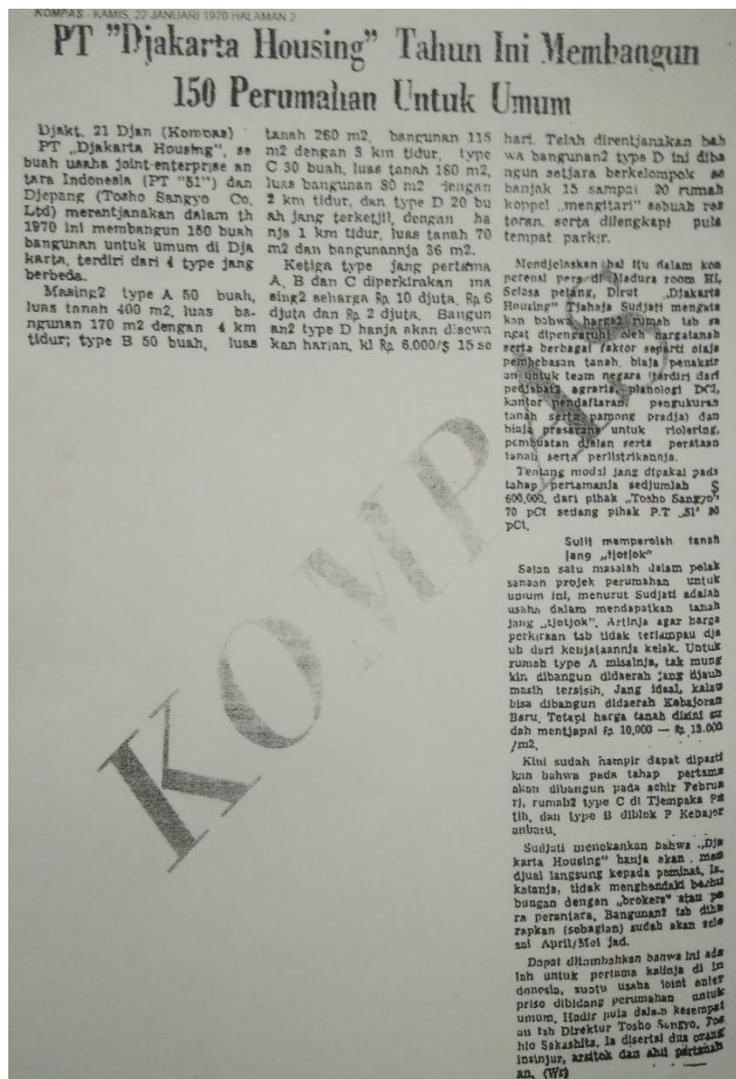
Statement “*Rumah Sehat*” pada masa orde baru juga merupakan pengulangan kembali dari masa kolonial. Rumah sehat yang dimaksud pada masa kolonial adalah rumah yang bersanitasi bagus. Artinya udara di lingkungan rumah yang ditinggali termasuk udara sehat dan tidak lembab. Namun pada masa orde baru dikemas dengan bahasa yang berbeda. Rumah sehat yang dimaksud pada masa orde baru adalah rumah yang memiliki pintu dan jendela dari kayu dan dapat dibuka waktu pagi, kemudian dapat ditutup waktu malam. Tetapi pada dasarnya tumpuan kata “*Sehat*” di dua masa tersebut adalah pada sirkulasi udara.

2 c. Wacana Rumah Rakyat Murah

Wacana *Rumah Murah* muncul dalam pemberitaan Kompas tahun 1973. Awalnya kata Rumah Murah diartikan sebagai bahan material rumah yang dijual dengan bantuan subsidi pemerintah agar rakyat dapat membangun rumah sendiri dengan kocek rendah, lambat laun berkembang

pengertian menjadi benda rumah yang dijual atau disewakan murah, kemudian bergeser menjadi sebuah proyek. Proyek tersebut tidak hanya menaungi pembangunan rumah, melainkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah beserta perencanaan tata kota dan regional.

Tahun 1970 Indonesia menjalin kerja sama dalam hal pembangunan rumah untuk rakyat. Kerja sama tersebut berbentuk *Join-venture* antara Indonesia dan Jepang. Perwakilan dari Indonesia adalah PT. 51 dan perwakilan dari Jepang adalah Tosho Sangyo. Co. Ltd yang kemudian digabung menjadi PT. Djakarta Housing. Kerja sama ini membangun rumah rakyat yang dikonsep “kontrak” dengan tenggang waktu minimal 1 tahun.



Gambar 14 Berita Join-Venture dengan Jepang
Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Tahun 1974 Pemerintah mencanangkan pembangunan perumahan pada PELITA II, dan mengurangi sistem kontrak rumah. Tujuannya dengan banyak rumah yang dapat disediakan oleh pemerintah, rakyat sedikit demi sedikit dapat meninggalkan sistem rumah kontrak. Sehingga rakyat dapat mempunyai rumah sendiri dengan harga rumah relatif lebih murah.

Dilain sisi, rumah direpresentasikan sebagai infrastruktur umum yang sedang diusahakan pengadaannya oleh pemerintah melalui kerja sama bilateral. Pada pemberitaan kompas pula dijelaskan bagaimana kerja

pemerintah dalam menangani hal tersebut, hingga terjadinya selisih informasi dan kebijakan antar departemen yang mengurusnya.

Jalan bilateral dalam penyediaan rumah juga pernah ditempuh Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno. Pemerintah pada masa orde lama pernah menjalin kerjasama dengan Amerika (UNCHS) untuk menangani pembangunan rumah rakyat di Indonesia. Dalam hal ini subjek yang disorot adalah Prof. Theodore, dimana beliau berpidato tentang permasalahan pembangunan rumah di Indonesia. Pidato tersebut dimuat pada majalah P.I.I tahun ke-4 No. 18 pada Mei 1957, dan dimuat kembali pada majalah Masalah Bangunan Regional Housing Centre edisi tahun 1958

Rumah juga direpresentasikan sebagai produk dari sebuah perusahaan yang dapat diperjual belikan. Kelengkapan barang yang dijual adalah tanah dan bangunan berupa rumah beserta sertifikat hak milik. Pada awalnya pembangunan rumah dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk rakyat, kemudian perlahan mengubah mindset rakyat tentang pembangunan rumah yang mengharuskan mempunyai banyak dana, dan perusahaan real estate Indonesia yang terkenal sebagai makelar tanah.

Pemberitaan tahun 1974 menyinggung tentang bagaimana keadaan lingkungan yang ada untuk perumahan masa itu. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan rakyat. Keadaan lingkungan diukur dari masalah mutu bangunan, kekuatan tanah, perlindungan, dan lain sebagainya. Namun untuk memulai jalan pembangunan, pemerintah tidak langsung membangun rumah untuk masyarakat. Melainkan menyediakan bahan-bahan bangunan murah agar dibeli oleh rakyat, sehingga rakyat dapat membangun rumah sendiri tanpa harus merogoh kocek tinggi.

Pada masa orde baru, masalah mutu bangunan, kekuatan tanah, perlindungan, dan lain sebagainya sudah pernah dimuat pada majalah "Masalah Bangunan Regional Housing Centre". Majalah tersebut memuat

tentang mutu bangunan rumah dengan berbagai konstruksi dari bahan material alami, yakni kayu dan bambu. Untuk kekuatan tanah, disesuaikan dengan iklim dan keadaan geografis setempat. Pasalnya tidak semua rumah dibangun menempel pada tanah, melainkan ada budaya rumah yang tinggi dan lantai tidak langsung menempel tanah. Kemudian dibawah rumah terdapat lorong sebagai tempat barang-barang dan hewan peliharaan. Artinya pembahasan tentang mutu bangunan dan ukuran ketahanan bangunan kembali diulang pemerintah orde baru dari kebijakan orde lama.

Perbedaan mendasar *Rumah Murah Rakyat* antara masa orde lama dan orde baru adalah sistem memperoleh dan proses pembangunan. Konsep rumah murah rakyat pada masa Soekarno adalah bagaimana rakyat dapat memanfaatkan bahan bangunan alam yang ada untuk dibangun rumah. Sedangkan rumah rakyat pada masa Soeharto adalah rumah (wujud tempat tinggal jadi) dan rakyat tinggal membayar ganti rugi resiko pembangunan.

2 d. Perusahaan Umum Nasional (PERUMNAS)

Pada pemberitaan tahun 1975 muncul kata “Perumahan Rakyat”. Kata tersebut muncul karena lembaga PERUMNAS yang didirikan oleh pemerintah orde baru telah melakukan pembangunan rumah bentuk perumahan (Rumah Seragam) di berbagai kota. PERUMNAS sendiri didirikan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1974. Rumah (Perumahan Rakyat) tersebut adalah lanjutan dari program pemerintah yang sebelumnya dikenal dengan “Rumah Rakyat”

Hal ini menandakan bahwa rumah telah benar-benar diambil alih oleh Negara pengadaannya untuk keluarga yang berpenghasilan menengah kebawah. Disisi lain aturan tersebut dibuat untuk kejelasan PERUMNAS dalam menjalankan tugas. Artinya progres kebijakan rumah semakin maju

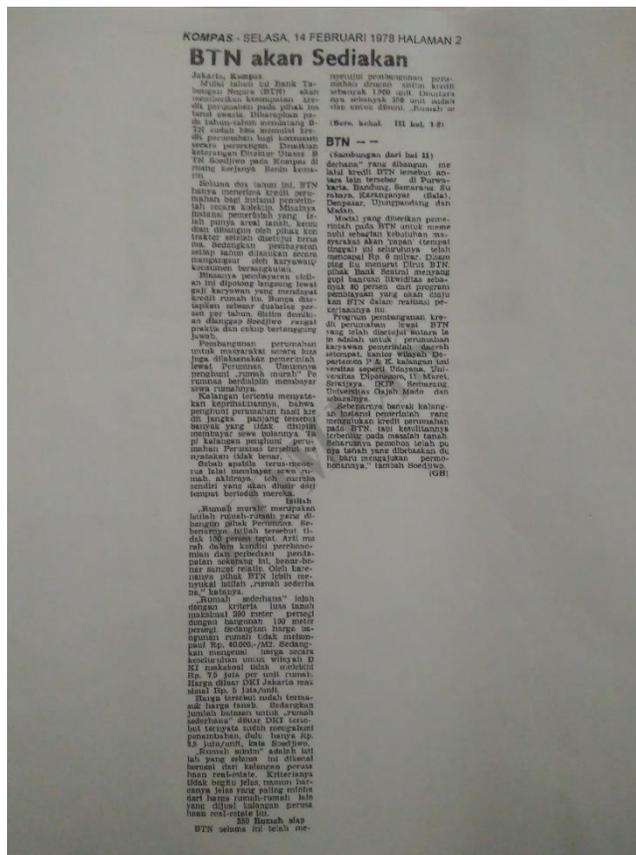
dan barang berupa rumah tersebut menjadi sorotan masyarakat karena dinaungi oleh pemerintah.

Pada tahun 1976 rumah diidentitaskan sebagai barang jual beli yang disediakan oleh pihak swasta. Hal ini karena sebelum pemerintah orde baru mengambil alih kebijakan pengadaan rumah, di Indonesia sudah ada perusahaan Real Estate yang kemudian ditarik oleh pemerintah untuk ikut membantu pembangunan rumah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan nama REI yang pada masa itu terkenal dengan makelar tanah dan bangunan.

Penghuni perumahan murah rakyat juga diatur oleh pemerintah orde baru. Prioritas utama sasaran program perumahan rakyat adalah pegawai negeri, pensiunan dan anggota ABRI yang termasuk golongan 1 dan F1. Golongan rakyat ini mendapat jatah 75% dari keseluruhan jumlah rumah yang dibangun oleh PERUMNAS. Kemudian prioritas kedua, yakni karyawan swasta. Termasuk para wartawan dengan bagian 15 persen, dan 10 persen lainnya diberikan pada rakyat lokasi setempat yang dekat dengan tempat dibangunnya perumahan rakyat.

Negara hanya mampu menyediakan desakan kebutuhan rumah rakyat yang timbul oleh perubahan penduduk. Dua masalah utama pembangunan rumah adalah kesulitan dalam persoalan penyediaan lahan untuk lokasi perumahan, dan pembangunan perumahan ditujukan bagi masyarakat yang menengah kebawah baik tetap maupun tidak. Sehingga untuk tetap terus menyediakan rumah tersebut masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Hingga pada tahun 1979 pemerintah memberlakukan sistem tabungan bertarget di Bank BTN sebagai solusi kebutuhan dana PERUMNAS dalam pengadaan rumah. Hal ini telah ditetapkan type rumah yang akan dibeli, jangka waktu pembayaran, dan besar cicilan pada setiap tempo pembayaran.



Gambar 15 Berita KPR
 Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Cikal bakal bank BTN diawali dengan didirikannya *Postspaarbank* di Batavia pada tahun 1897. Bank ini didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang bertujuan mengajarkan rakyat gemar menabung. Pada tahun 1942, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini digantikan dengan *Tyokin Kyoku* atau *Chokinkyoku*. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Kantor Tabungan Pos.

Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia (rupiah). Tetapi tugas tersebut tidak lama, karena agresi militer Belanda (Desember 1946) mengakibatkan dikuasainya semua kantor termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949. Lembaga ini bernaung dibawah Kementerian

Perhubungan. Kemudian nama bank tabungan pos diganti dengan Bank Tabungan Negara. (elib.unikom.ac.id)

Tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR (Kredit Pinjaman Rumah) dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Artinya pemberlakuan kredit terjadi pasca PERUMNAS didirikan. Pemikiran untuk menabung uang sudah dilakukan sejak masa kolonial, namun program tersebut dikembangkan dan dikelola dengan tujuan tertentu oleh pemerintah orde baru melalui program KPR PERUMNAS. (elib.unikom.ac.id)

B. Pembahasan

Wacana perumahan di tiap periode mempunyai struktur wacana atau pengetahuan sendiri. Pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan yang berjalan pada masa itu. Kebijakan politik di tiap periode pemerintahan memproduksi semangat nasionalisme yang berbeda di bidang perumahan.

Penelitian ini menjadikan pemberitaan koran Kompas tahun 1970 hingga 1979 sebagai objek penelitian. Sepanjang tahun 1970 sampai tahun 1979 Indonesia berada pada kepemimpinan presiden Soeharto. Sejarah mencatat pada masa orde baru, media tidak serta merta bebas untuk memberitakan suatu hal, melainkan diatur oleh pemerintah untuk selalu memberitakan positif tentang kebijakan pemerintah.

Namun media Kompas sebenarnya tidak hanya serta merta memberitakan informasi sesuai dengan kepentingan pemerintah, melainkan sesuai dengan struktur wacana pengetahuan rakyat pada masa itu. Wacana yang dibentuk oleh Kompas adalah wacana negara sebagai pengatur perumahan, wacana rumah sehat, wacana rumah rakyat murah dan wacana perusahaan umum nasional (PERUMNAS).

Wacana rumah “Negara sebagai Pengatur Perumahan” muncul ketika pada masa itu Negara memberikan fasilitas rumah untuk pegawai negeri, pensiunan, dan ABRI. Rumah yang diberikan oleh negara tersebut digunakan sebagai fasilitas penunjang pekerjaan aparat sebagai bentuk usaha kemajuan negara. Hal ini menandakan bahwa rakyat yang menjadi abdi Negara atau pegawai negeri difasilitasi rumah oleh Negara. Sekilas wacana “Negara sebagai Pengatur Perumahan” akan nampak sama dengan kebijakan perumahan pada masa kolonial Belanda, dimana tahun 1932 Belanda memfasilitasi rumah berupa benteng untuk para pekerja Belanda.

Pemberian rumah benteng atau loji Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial Hindia-Belanda yang memburuk dengan mengakui beberapa kesalahan karena persyaratan perdagangan. Untuk menutupi hal tersebut dan mengurangi rasa bersalah, maka Belanda mempromosikan pembangunan, termasuk pula pembangunan untuk kepentingan Belanda di tanah jajahan.

Lain halnya dengan posisi pemerintahan orde baru yang memfasilitasi para pegawai negeri, kebijakan tersebut ditempuh sebagai batu loncatan untuk memajukan ekonomi negara. Pada masa itu kebijakan perumahan masa orde baru adalah membangun 150 rumah untuk rakyat dengan cara *joint venture* modal antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, pemerintah orde baru juga mengusahakan pembangunan rumah melalui kerjasama berupa *fisibiling study* dengan Belgia. Hal ini menandakan bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah sebuah langkah kemajuan yang pada akhirnya memposisikan Negara dan atau pemerintah sebagai pengatur perumahan.

Kompas mewacanakan rumah dengan wacana “Rumah Sehat” pada tahun 1970, dimana wacana tersebut didasari dengan adanya lokakarya rumah sehat di Bandung. Pada berita Kompas dijelaskan pula yang dimaksud rumah sehat adalah rumah yang memiliki pintu dan jendela dari bambu atau kayu, sedangkan bentuk jendela sama dengan pintu yang

bertujuan untuk dapat dibuka pada pagi hari dan dapat ditutup pada malam hari. Hal ini dilakukan agar perumahan rakyat memiliki sanitasi yang bagus agar lingkungan sekitar rumah tidak lembab.

Konsep “Rumah Sehat” sempat juga diterapkan pada pemerintahan Soekarno, dimana dengan pembangunan semesta berencana rakyat dengan budaya setempat dapat membangun rumah secara pribadi dengan arahan majalah terbitan Regional Housing Centre. Pada majalah tersebut dijelaskan bahwa rumah yang baik adalah rumah yang sesuai dengan adat budaya masing-masing dengan masih tetap memperhatikan tingkat kelembaban udara, membedakan tempat hewan ternak dengan tempat tinggal keluarga, dan pemilihan bahan baku bangunan yang disesuaikan dengan iklim serta keadaan alam daerah masing-masing.

Pada zaman kolonial Belanda, konsep “Rumah Sehat” muncul setelah adanya perbaikan kampung. Perbaikan kampung bertujuan untuk memperbaiki saluran air dan sistem sanitasi rumah penduduk. Tujuan yang lain adalah melindungi pemukiman Belanda dari wabah pes yang marak di seluruh Asia pada masa itu. Penyakit pes menyebar dengan mudah di area yang padat dan di daerah bersanitasi buruk, serta area yang memiliki populasi hewan pengerat yang cukup tinggi khususnya tikus.

Wacana “Rumah Sehat” diulang dari masa ke masa dengan dasar pemikiran yang sama, yakni kelembaban udara dan sistem sanitasi. Namun pengulangan tersebut disampaikan oleh setiap masa pemerintahan dengan cara yang berbeda-beda.

Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia melakukan pembangunan negara dari segala aspek. Di pedesaan sektor pertanian dimajukan, dan begitu pula sektor industri di kota. Dari pembangunan tersebut banyak lingkungan warga tergusur oleh proyek pembangunan. Dari hal tersebut muncul wacana “Rumah Rakyat Murah” karena rumah yang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri saja, akhirnya ditambah kuota penggunaan dengan rakyat yang lahannya tergusur. Rakyat yang tergusur

oleh program pemerintah diberikan harga murah untuk dapat menghuninya.

Berbeda dengan konsep “Rumah Murah” pada masa pemerintahan Soekarno. “Rumah Murah” pada masa pemerintahan Soekarno adalah bagaimana rakyat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar tempat tinggal. Seperti halnya kayu dan bambu yang tumbuh liar di hutan, kemudian dapat dijadikan bahan baku rumah dengan cara membangun yang sudah diarahkan oleh Regional housing Centre juga publikasi pada majalahnya secara bertahap.

Kelihatanya konsep ”Rumah Murah” diulang kembali pada masa pemerintahan soeharto, namun konsep penyampaian dan latar belakang peristiwa yang berbeda menjadikan wacana *Rumah Murah* menjadi serupa namun tidak sama.

Pembangunan negara terus berlanjut hingga pemerintah membentuk perusahaan umum nasional (Perumnas). Pada masa itu tugas utama perumnas adalah menyediakan rumah untuk rakyat. Wacana “Rumah Perumnas” muncul karena adanya pembangunan perumahan oleh perumnas.

Wacana-wacana tersebut muncul karena berkembangnya pengetahuan rakyat pada masa itu, dimana rumah yang awalnya barang privat keluarga menjadi barang yang diatur pengadaannya oleh pemerintah. Aturan tersebut dimulai dari ukuran kebersihan lingkungan, sistem sanitasi, dan beberapa hal lainnya yang pada masa itu baru mulai dipraktikan untuk pembiasaan dan selanjutnya sebagai standardisasi.

Pada dasarnya dengan konsep sistem ekonomi kapitalis, sikap nasionalisme yang ditanamkan pada masa itu adalah mencintai negara dengan menggunakan produk dalam negri, tidak terkecuali rumah dan bahan-bahan materialnya. Dalam hal ini media turut berperan untuk membantu menjalankan program pemerintah.

Salah satu fungsi media adalah me-mediasi objek pemberitaan, namun dalam me-mediasi perumahan media masa tidak hanya digerakkan oleh kebijakan redaksional, tetapi juga mengulang atau memunculkan wacana baru. Seperti halnya media me-mediasi pemberitaan tentang rumah dari periode ke periode.

Wacana *Rumah Sehat* mulai muncul pertama kali pada masa kolonial Belanda, dimana rumah sehat digambarkan dengan pembersihan lingkungan masyarakat oleh belanda. Rumah sehat di zaman kolonial diartikan sebagai rumah yang bebas dari bakteri penyakit pes. Pada zaman orde baru, wacana *Rumah Sehat* masih berlaku. Lain halnya zaman kolonial, wacana rumah sehat pada masa orde baru digambarkan dengan rumah yang mempunyai ventilasi udara dan sistem sanitasi yang bagus.

Pada masa orde baru, wacana tersebut kembali diulang. *Rumah Sehat* pada masa orde baru diartikan sebagai rumah yang mempunyai jendela dan pintu yang terbuat dari kayu atau bambu. Jendela tersebut dapat dibuka pada pagi hari untuk pergantian udara, dan dapat ditutup pada malam hari untuk menghindari udara jahat malam hari.

Posisi negara sebagai pengatur perumahan telah dimulai pada masa kolonial, dimana pada tahun 1924 pemerintah Belanda memberikan fasilitas rumah berupa loji (benteng Belanda) untuk para pegawainya. Wacana ini diulang kembali pada masa orde baru dengan adanya pembangunan rumah hasil joint-venture Indonesia dan Jepang. Rumah hasil pembangunan tersebut diperuntukkan kepada rakyat dengan prioritas utama golongan pegawai negeri, pensiunan dan anggota ABRI yang termasuk golongan 1 dan F1. Kemudian prioritas kedua, yakni karyawan swasta, termasuk para wartawan dengan bagian 15 persen.

Berkembangnya pengetahuan masyarakat juga berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam hal papan. Zaman dahulu rumah dibuat dengan kocek yang tinggi karena harus mempunyai tanah dahulu kemudian baru dapat mendirikan bangunan rumah. Kemudian

pada masa orde baru muncul wacana *Rumah Rakyat Murah*, dimana yang dimaksud adalah pembangunan rumah untuk rakyat dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal rakyat, seperti kayu dan bambu yang tumbuh liar.

Wacana *Rumah Rakyat Murah* pada masa orde lama diulang kembali pada masa orde baru. Namun *Rumah Rakyat Murah* pada masa orde baru berbeda konsep dengan *Rumah Rakyat Murah* pada masa orde lama. Konsep *Rumah Rakyat Murah* pada masa orde baru lebih pada pemberian fasilitas berupa “subsidi” pada bahan material pembangunan rumah. Tujuannya agar rakyat dari segala lapisan sosial dapat mendirikan rumah sendiri dengan miringnya harga material bangunan.

Pada pemerintahan Soeharto, muncul wacana baru dalam pemberitaan perumahan. Wacana tersebut adalah wacana *perumahan perumnas*. Perumnas sendiri adalah perusahaan negara yang memiliki tiga badan pokok, yakni otorita perumahan nasional, bank hipotik perumahan, dan perum pembangunan perumahan. Walaupun wacana perumahan perumnas baru muncul pada masa orde baru, namun sebenarnya sebagian sistem perumnas mengulang wacana dari masa kolonial.

Pada wacana perumahan perumnas, terdapat badan otorita perumahan yang bertugas menangani pertumbuhan pembangunan kota dalam hal papan atau yang kini kita kenal dengan program otonomi daerah. Sama halnya otonomi daerah, sistem tersebut dikenal dengan sistem desentralisasi kota pada zaman kolonial Belanda. Sistem desentralisasi mengharuskan adanya kontrol terpusat dari pemerintah pusat pada semua pembangunan rumah yang dilakukan di semua kota bentukan Belanda. Untuk membantu kerja pemerintah orde baru dalam mengatasi resiko pembangunan rumah, pemerintah orde baru menambahkan dua badan baru yang saat ini telah diwujudkan dengan adanya perumahan perumnas dan Kredit KPR pada bank BTN.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Barang keluarga berupa rumah kini bukan lagi hanya sebagai kebutuhan akan papan, melainkan juga sebagai ukuran sosial hidup bermasyarakat. Pendefinisian barang berupa rumah tersebut datang dari berbagai pihak, diantaranya dari pihak masyarakat, media, bahkan pemerintah. Rumah didefinisikan melalui berita di Kompas dengan mencakup tentang pegeseran nilai rumah, akan tetapi rumah didefinisikan oleh pemerintah melalui kebijakan politik tentang aturan perumahan. Pihak masyarakat sendiri mendefinisikan rumah sebagai barang yang spesial, karena rumah pada zaman pemerintahan Soeharto dirancang sebagai program kemajuan Negara.

Pemberitaan tentang rumah berkembang, awal mulanya rumah diberitakan atau juga dapat didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi, namun seiring berjalannya waktu pemberitaan rumah bergeser menjadi barang yang diprogramkan pemerintah peyediaannya. Dalam berita-berita tersebut memunculkan beberapa wacana-wacana yang mendukung eksistensi sebuah rumah itu sendiri, dimana wacana tersebut merupakan pengulangan wacana pada masa pemerintah sebelum orde baru.

Berita perumahan Kompas tidak hanya memunculkan wacana tentang perumahan, secara tidak langsung menjelaskan tentang pemahaman pengetahuan masyarakat tentang rumah pada masa itu. Peran media dalam hal ini Kompas dapat diartikan bahwa tidak hanya sebagai pembela pemerintahan Soeharto atau media publikasi program pemerintah, melainkan menyatakan kemampuan masyarakat dalam hal penyediaan rumah dan sebangsanya.

Wacana-wacana yang muncul pada masa itu antara lain adalah wacana posisi Negara sebagai pengatur perumahan, wacana rumah sehat, wacana rumah rakyat murah, dan wacana rumah PERUMNAS.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan atau kekurangan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian terbatas pada kebijakan perumahan saja
2. Penelitian ini melibatkan media-media yang saat ini sudah tidak terbit lagi. Sehingga bahan untuk menyusun struktur wacana perumahan kurang memadai.
3. Peneliti hanya meneliti praktik wacana rumah di Kompas pada tahun 1970 sampai 1979
4. Penelitian ini hanya fokus dengan praktik wacana yang ada di berita Kompas saja, akan tetapi masih banyak aspek yang menarik untuk diangkat dalam penelitian, seperti penggambaran makna berita atau melihat sisi sudut pandang redaksi.

C. REKOMENDASI

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih banyak membaca buku penunjang untuk menyusun penelitian. Terutama dengan topik wacana yang mengkaitkan pemberitaan di tahun-tahun yang telah lalu.
2. Penelitian dilakukan dengan data yang lebih variatif, agar lebih jelas dan mudah untuk menentukan arah penelitian
3. Meneliti mengenai tempat (place) di media yang lain untuk dijadikan
4. penelitian sehingga dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Mengingat penelitian tentang komunikasi geografi masih jarang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adi Susilo Taufik.** 2016. Ensiklopedi Presiden republik Indonesia: Soeharto.
Yogyakarta: Ar-Ruzz media
- Alex Sobur.** 2002. Analisis teks Media. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Alit I K.** 2003. Kinerja Undagi dalam Pembangunan Perumahan. Bali: Universitas Udayana
- Claval Paul.** 2004. At The Heart of The Cultural Approach in Geography: Thinking Space. Jurnal online
- Colombijn Freek.** 2010. The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1930-1960. Leiden-Boston: Brill
- Daras Roro.** 2014. Total Bung Karno 2. Depok: Imania
- David T. Hill.** 2011. Pers di Masa orde Baru. Jakarta Pusat: Pustaka Yayasan Obor Indonesia
- Delik Hudalah dan Johan Woltjer.** 2007. Spatial Planning System In Transisional Indonesia.
- Eriyanto.** 2009. Analisis Wacana. Yogyakarta: LKIS
- Fahirah F.** 2011. Variabel-Variabel Penilaian Properti pada Perumahan di Palu Barat. Palu: Universitas Tadulako
- Grimes dan Orville F.** 2012. Housing for Low-Income Urban Families: Economics and Policy in the Developing World. Jurnal Online
- Hariyatmoko.** 2017. Critical Discourse Analisis. Jakarta: Rajawali Pers
- Harris Richard.** 2009. Urban Geography. Canada: McMaster University
- Henry Levebre.** 1991. The Production of Space. Diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Cambridge: Basil Blackwell, Inc.2012.
- Hidayati Z.** 2012. Hubungan Lay Out Perumahan dan Faktor kriminalitas di Perumnas Air Putih samarinda. Samarinda: Politeknik Samarinda.
- K. Raharjo Imam Toko dan WK Herdianto.** 2001. Soekarno. Jakarta: Grasindo
- Keman Soedjajadi.** 2005. Kesehatan Pemukiman dan Lingkungan Pemukiman. Surabaya: Universitas Airlangga

- Lucas, Robert E., Jr.** 2002. Lectures on Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.
- Mayjen (Purn) ishak Odang.** 1996. Dinamika Orde Baru dalam Pembangunan Jangka Panjang II. Jakarta: Yayasan Bina Taruna
- Mulyana.** 2005. Wacana Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip wacana. Yogyakarta: Tiara wacana
- Neils Akerstrom Andersen.** 2003. Discursive Analytical Strategies. UK: the olicity Press
- Noor shiddin Fashbir.** 2002. Housing Policy Systems in South and East Asia. Malaysia.: Pallgrave Macmillan.
- Paul C Adams dan Danandre Jasson.** 2012. Communication Geography: a bridge between disciplines. Jurnal online
- Paul C Adams.** 2010. A Taxonomy for Communication Geography. USA: The University of Texas at Austin
- Prof. Dr. Sugiyono.** 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. Wilson. W. Donald.** 1989. The Long Journey From Turmoil to self-Sufficiency. Jakarta: State Secretariat of The Republic Indonesia
- Putra D dan Yana G.** 2007. Pemenuhan atas Perumahan salah satu Penanggulangan Kemiskinan. Bali: Universitas Udayana
- Ricklefs. M.C.** 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi
- Roeder. O. G.** 1982. Anak Desa Biografi Presiden Soeharto. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Sularto S.t dan Santoso F. hariato.** 2016. Kompas Way Jacob's Legacy. Jakarta: Kompas
- Sheila Jasanoff dan Sang Hyun Kim.** 2015. Dreamscapes of Modernity. London: University of Chicago
- Suparwoko.** 2012. Pembangunan Perumahan Swadaya di Indonesia. Yogyakarta: Total Media

Team Dokumentasi Presiden RI. Ed. Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. Jejak Langkah Pak Harto (27 maret 1973 – 23 maret 1978). Jakarta: PT. Cipta Lamtoro Gung Persada

Team Dokumentasi Presiden RI. Ed. Nazaruddin Sjamsuddin. 1992. Jejak Langkah Pak Harto (29 maret 1978 – 11 maret 1983). Jakarta: PT. Cipta Lamtoro Gung Persada

Tipple Graham. 1991. Housing the Poor in the Developing Word. London: Routledge

Teguh Sulistiyani Ambar. 2002. Problematika dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan. Jurnal Online

Ricard Haris. 2013. Housing Policy fot the Colonial City: The British ans Dutch Experience Compared 1901-1949. London: MC Master University

Rudy Trisno. 2012. Perception of the Inhabitants and Feng Shui Concept for the Balinese Traditional Housing that Adapts Nawa Sanga Space Concept. Jakarta: Trisakti University.

Vale J. Lawrence. 1992. Architecture, Power and National Identity. London: Yale University Press

Wood Michael. 2013. Sejarah Resmi Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Yasir . 2012. Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif bagi Ilmu komunikasi. Riau: Universitas Riau

Web Online:

<http://www.perumnas.co.id>. Online. Diakses pada tanggal 12 maret 2017

<http://perumahan.pu.go.id>. Online. Diakses pada tanggal 12 maret 2017

<http://meikarta.com>. Online. Diakses tanggal 15 oktober 2017

<http://pu.go.id>. Diakses tanggal 6 Desember 2017

<https://www.itb.ac.id>. Online. Diakses 15 Januari 2018

<https://kemenlu.go.id>. Online. Diakses 16 Januari 2018

<https://www.rei.or.id>. Online. Diakses 16 Januari 2018

<http://www.remotivi.or.id/kupas/374/Memikirkan-Ulang-Media-dalam-Komunikasi-Geografi>

Koran:

Berita Indonesia Raya edisi 9 september 1969

Berita Indonesia Raya edisi 7 september 1969

Berita Pos Kota edisi 1972

Berita Kompas edisi 22 januari 1970 hal. 2

Berita Kompas edisi 12 februari 1975 hal. 8

Berita Kompas edisi 14 maret 1970 hal. 3

Tabloid:

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Januari-April 1958

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Oktober-November
1958

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Januari 1959

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Juli 1959

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Juli 1959

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Desember 1972

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Oktober-November
1972

Majalah Abstract Bangunan Regional Housing Centre Edisi Maret 1973

Katalog UNCHS Edisi 1995

Aturan Negara:

Tap. MPR No.2 tahun 1960